

No. Reg: 191160000025145

LAPORAN PENELITIAN



HARMONISASI KEHIDUPAN BERAGAMA INTRA ISLAM  
DI ACEH STUDI PENGUATAN PERAN MAJELIS TA'LIM  
KELOMPOK PEREMPUAN

**Ketua Peneliti**

Dr. Rasyidah, M.Ag

NIDN: 2008097301

ID Peneliti: 200809730104396

**Anggota:**

1. Dra. Mustabsyirah M.Husein, M.Ag

2. Dwi Dendi, M.Si

Kategori Penelitian	Penelitian Dasar Interdisipliner
Bidang Ilmu Kajian	Dakwah dan Pengembangan Masyarakat
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
OKTOBER 2019

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY  
TAHUN 2019**

1. a. Judul Penelitian : Harmonisasi Kehidupan Beragama Intra Islam di Aceh Studi Penguatan Peran Majelis Ta'lim Kelompok Perempuan
- b. Kategori Penelitian : Penelitian Dasar Interdisipliner
- c. No. Registrasi : **19116000025145**
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Dakwah dan Pengembangan Masyarakat
2. Peneliti/Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Dr. Rasyidah, M.Ag
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. NIP(*Kosongkan bagi Non PNS*) : 197309081998032002
  - d. NIDN : 2008097301
  - e. NIPN (ID Peneliti) : 200809730104396
  - f. Pangkat/Gol. : IV/a
  - g. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - h. Fakultas/Prodi : Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
  - i. Anggota Peneliti 1
    - Nama Lengkap : Dra. Mustabsyirah M.Husein, M.Ag
    - Jenis Kelamin : Perempuan
    - Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry
  - j. Anggota Peneliti 2
    - Nama Lengkap : Dwi Dendi
    - Jenis Kelamin : Perempuan
    - Fakultas/Prodi : -
3. Lokasi Penelitian :
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2019
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 40.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2019
8. *Output* dan *Outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan  
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

**Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.**  
NIP. 197204261997031002

Banda Aceh, 30 Oktober 2018  
Peneliti,

**Dr. Rasyidah, M.Ag**  
NIDN. 2008097301

Menyetujui:  
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

**Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.**  
NIP. 195811121985031007

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : **Dr. Rasyidah, M.Ag**  
NIDN : 2008097301  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/ Tgl. Lahir : Medan, 08-09-1973  
Alamat : Perum World Bank Dusun  
Lambateung  
Fakultas/Prodi : Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-  
Raniry/Pengembangan Masyarakat  
Islam

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“Harmonisasi Kehidupan Beragama Intra Islam di Aceh Studi Penguatan Peran Majelis Ta’lim Kelompok Perempuan”** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2019. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019

Saya yang membuat pernyataan,  
Ketua Peneliti,



**Dr. Rasyidah, M.Ag**  
NIDN. 2008097301

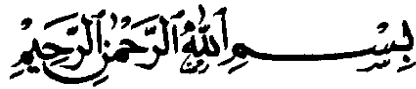
## ABSTRAK

Wacana sesat dan menyesatkan telah menimbulkan sikap keberagamaan yang tegang di tengah masyarakat, bahkan acap kali berujung konflik dan kekerasan. Diantara penyebabnya adalah pola internalisasi agama yang kurang terbuka terhadap perbedaan. Situasi ini mendorong banyak pihak untuk menciptakan hidup yang toleransi dan damai. Kelompok Majelis Ta'lim (MT) kaum ibu (beut kaum mak) merupakan kelompok yang potensial untuk membangun keberagamaan yang damai di Aceh, hanya saja belum berfungsi maksimal. Atas dasar inilah maka penelitian ini dilakukan, dengan tujuan: untuk mengidentifikasi isu disharmonisasi kehidupan beragama intra Islam yang dialami kelompok perempuan di Aceh, mengetahui posisi majelis ta'lim kelompok perempuan dalam konstelasi harmonisasi kehidupan beragama intra Islam, dan untuk mengetahui peluang dan tantangan penguatan peran majelis ta'lim dalam harmonisasi kehidupan beragama intra Islam di Aceh. Penelitian yang dilakukan di Aceh Barat Daya, Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, FGD dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan, isu disharmonisasi yang dialami kelompok perempuan, terkait: perbedaan amalan PERTI, NU dan Muhammadiyah, munculnya kelompok salafi/wahabi, dan persaingan antar teungku pengajian, termasuk isu peran publik perempuan yang dialamatkan pada teungku inong. Adapun terkait posisi majelis ta'lim kelompok perempuan dalam konstelasi harmonisasi kehidupan beragama intra Islam ada lima, yaitu: sebagai penyeimbang, peredam, pencair relasi, menjadi benteng, yang memperkuat ketahanan masyarakat, dan menjadi mediator yang memperbesar konflik antar teungku. Hasil lainnya adalah peluang penguatan MT, yaitu: semangat kaum ibu, kemandirian majelis ta'lim sebagai organisasi gress root, keberadaan MT yang langsung di bawah pembinaan Kementerian Agama, dan keberpihakan banyak resources untuk melakukan pembinaan MT, dan terakhir komitmen politik yang berpihak. Adapun tantangan Penguatan Peran Majelis Ta'lim adalah: masih ditematkannya MT sebagai sasaran atau objek pembangunan bukan subjek pembangunan. Kedua, belum ada satu dinas manapun yang secara jelas menempatkan pemberdayaan MT sebagai salah satu tupoksinya.

*Key word: harmonisasi, Islam, Majelis, Ta'lim*

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Harmonisasi Kehidupan Beragama Intra Islam di Aceh Studi Penguatan Peran Majelis Ta'lim Kelompok Perempuan”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Bapak Ketua MPU Abdya;
5. Anggota MPU Provinsi Aceh;
6. Dinas Syariat Islam Abdya;
7. Kemenag Abdya Kasie Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat Islam;
8. Lembaga Aisyiah Abdya, Banda Aceh dan Provinsi Aceh
9. Ulama dari kalangan NU Banda Aceh, Provinsi dan Aceh Barat Daya

10. Tokoh Perempuan di Abdya, Banda Aceh dan Aceh Besar
11. Anggota Majelis Adat Aceh di Abdya, dan Provinsi Aceh
12. Kelompok Majelis Tak'lim Kaum Ibu Abdya, Aceh Besar, dan Banda Aceh.
13. Penceramah Aktif dalam Majelis Tak'lim di Aceh Besar, Abdya dan Banda Aceh
14. Enumerator dari Prodi PMI: Husfa Helsi untuk Aceh Barat Daya, As Syifa untuk Banda Aceh, dan Anita Maudi di Aceh Besar
15. Serta pihak pihak lain yang telah turut serta membantu penelitian ini

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 28 Oktober 2019

Ketua Peneliti,



**Dr. Rasyidah, M.Ag**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>DAFTAR ISI</b> .....	3
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	4
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Teori Terkait .....	10
<b>BAB III : METODE DAN DESAIN PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian .....	15
B. Desain Penelitian .....	16
C. Etika Penelitian .....	16
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Konteks Lokasi Penelitian .....	19
B. Isu Disharmonisasi Kehidupan Beragama Intra Islam yang Dialami Kaum Perempuan.....	22
C. Posisi Majelis Ta’lim Ditengah Konstelasi Disharmonisasi Kehidupan Beragama Intra Islam .....	49
D. Peluang dan Tantangan Penguatan Peran Majelis Ta’lim dalam Harmonisasi Kehidupan Beragama Intra Islam di Aceh .....	60
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	69
.....	

B. Saran-saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN FOTO KEGIATAN.....</b>	<b>75</b>
<b>JADWAL KEGIATAN PENELITIAN .....</b>	<b>77</b>
<b>BIODATA PENELITI .....</b>	<b>79</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir, keharmonisan intra umat Islam di Aceh terusik kembali. Fenomenanya adalah permusuhan dalam bentuk yang terbuka atau terpendam antara warga masyarakat yang berbeda faham keagamaannya, seperti klaim terhadap kelompok yang dianggap Wahabi dan sesat. Isu teranyar adalah masalah “perebutan” Masjid Raya Banda Aceh oleh kalangan tertentu untuk melakukan tertib Khutbah Jum’at seperti yang mereka inginkan, dengan tudingan bahwa tertib khutbah Jum’at di Masjid Raya selama ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Mazhab Syafi’i yang dianut oleh masyarakat Aceh.<sup>1</sup> Kisruh terkait pelaksanaan tertib Jum’at di Mesjid ini telah dijadikan agenda penting dalam Muzakarah Ulama Aceh pada bulan Oktober 2015.<sup>2</sup>

Fenomena di atas telah menggelisahkan banyak kalangan karena telah memunculkan rasa saling curiga dan ketidakpercayaan satu sama lain. Klaim yang sangat berbahaya adalah “mereka bukan kita”; “ibadah mereka tidak sama dengan ibadah kita”; “mereka NU”; “mereka Muhammadiyah”; alumni dayah dan non dayah; dan lainnya. Kata-katanya sangat sederhana, namun “implikasinya berbahaya” karena memunculkan potensi perpecahan.

Wacana sesat dan kesesatan menimbulkan sikap keberagaman yang tegang di tengah masyarakat. Kecurigaan tinggi terhadap perbedaan kerap menjadi pemicu keretakan di tengah-tengah masyarakat bahkan acap kali berujung konflik dan kekerasan. Salah

---

<sup>1</sup><http://aceh.tribunnews.com/2015/06/26/menyoal-benturan-antarmazahab-di-aceh>

<sup>2</sup><http://aceh.tribunnews.com/2015/10/27/persoalan-masjid-raya-dimuzakarahkan>.

satu penyebab munculnya persoalan ini adalah pola internalisasi agama yang kurang terbuka terhadap perbedaan dan kentalnya "truth claim" yang menganggap diri dan kelompoknya saja yang benar.

Situasi ini mendorong banyak pihak mulai terpenggil untuk terlibat dalam menjaga dan menciptakan hidup toleransi dan damai. Kelompok Majelis Ta'lim kaum ibu (*beut kaum mak*) merupakan kelompok yang diandalkan dalam membangun keberagaman yang damai. Hanya saja majelis ta'lim ini belum berfungsi secara efektif untuk mencerdas sebagaimana fungsi yang diharapkan berdasarkan kebijakan negara. Ada beberapa argumentasi mengapa majlis ta'lim kaum ibu ini menjadi pilar penting untuk membangun harmonisasi kehidupan beragama di Aceh:

1. Kelompok perempuan memiliki energi damai yang kuat
2. Majelis ta'lim kaum ibu merupakan lembaga sosial keagamaan yang paling aktif di setiap gampong untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berkontribusi terhadap ketahanan sosial masyarakat Aceh.
3. Majelis ta'lim memiliki banyak anggota yang terdiri dari kaum ibu yang merupakan pilar pelaksana sistem pendidikan di keluarga masing masing
4. Relasi keanggotaan majelis ta'lim terikat secara emosif kepatuhan terhadap pesan-pesan yang disampaikan melalui proses pengajian.

Mengingat strategisnya kelompok ini, maka sangat perlu memperkuat energi damai yang ada. Akan tetapi hal ini yang belum dimaksimalkan, alih-alih menjadi proses yang memperkuat semangat harmonisasi, justru tempat ini malah menjadi proses pembelajaran yang mendukung doktrin dan eksklusifitas.

Untuk memutus mata rantai intoleransi sebagaimana di singgung di atas, maka urgen mengoptimalkan lembaga Majelis Ta'lim sebagai

pendorong harmonisasi intra Islam. Majelis Ta'lim merupakan satu satunya tempat belajar kaum ibu yang sangat eksis di masyarakat Aceh. Apa yang dipelajari menjadi konstruksi penting yang mempengaruhi pola pikir, perilaku keberagamaan, pola asuh, relasi peran dan interaksi sosial kaum ibu yang diajarkan pada anak-anak dan keluarganya. Selain itu, kaum ibu dengan beragam aktifitas di majelis ta'lim menjadi potensi perekat yang sangat kuat yang berkontribusi besar bagi ketahanan sosial masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah isu disharmonisasi kehidupan beragama intra Islam yang dialami kelompok perempuan di Aceh
2. Bagaimanakah posisi majelis ta'lim kelompok perempuan dalam konstelasi harmonisasi kehidupan beragama intra Islam di Aceh
3. Bagaimanakah peluang dan tantangan penguatan peran majelis ta'lim dalam harmonisasi kehidupan beragama intra Islam di Aceh

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi isu disharmonisasi kehidupan beragama intra Islam yang dialami kelompok perempuan di Aceh
2. Untuk mengetahui posisi majelis ta'lim kelompok perempuan dalam konstelasi harmonisasi kehidupan beragama intra Islam di Aceh
3. Untuk mengetahui peluang dan tantangan penguatan peran majelis ta'lim dalam harmonisasi kehidupan beragama intra Islam di Aceh.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Beberapa Penelitian Terkait sebagaimana dilakukan oleh Horace M.Kallen (1972: 51-54) yang membagi bentuk keberagamaan radikal pada beberapa cirri yaitu: pertama radikalisme merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Biasanya respon muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan terhadap asumsi, ide, lembaga atau nilai nilai. Kedua, radikalisme tidak berhenti pada upaya penolakan tetapi terus berupaya menggantikan tatanan tersebut dengan suatu bentuk tatanan lain. Sesuai dengan arti kata *radic*, sikap radikal mengandung keinginan untuk mengubah keadaan secara mendasar. Ciri ketiga adalah kuatnya keyakinan kaum radikal akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Sikap ini pada saat yang sama dibarengi dengan penafian kebenaran sistem lain, dan munculnya sikap emosional dikalangan kaum radikal.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Analiansyah, dkk pada tahun 2015 berupa penelitian action research yang mendampingi dua majelis ta'lim di daerah pesisir Aceh Besar dari segi management dan kepemimpinannya. Tujuannya penguatannya diarahkan untuk mempersiapkan majelis ta'lim sebagai lembaga yang mampu mendukung dan membina anggotanya juga keluarga anggota. Fokus materi pendampingan selain manajemen adalah skill pola asuh yang islami. Hasil penelitiannya menunjukkan potensi kuat yang dimiliki Majelis Ta'lim mampu mengembangkan berbagai aktifitas pemersatu dan kegiatan pencerdasan di masyarakat.

Kajian lainnya adalah terkait konsep *civil religion* yang merupakan hasil renungan konseptual karya Robert. N Bellah berdasarkan analisisnya terhadap pengalaman keberagamaan di Amerika Serikat; (Robert N. Bellah, 2000:273) juga berdasarkan hasil penelitiannya tentang keberagamaan di Tokugawa, Jepang; pun juga keberagamaan di Perancis. Dari analisisnya itu, tampak bahwa agama sipil ternyata memiliki varian, misalnya; di Jepang, tipikalnya adalah bahwa agama Budha, Shinto, Konfusianisme, memiliki kontribusi amat positif dalam membangun semangat moral masyarakat sehingga mampu membangun semangat hidup dunia yang positif dan berkemajuan luar biasa yang dipandu oleh pemerintah negara; demikian juga di Amerika Serikat, bahwa ketika berkonflik antar keyakinan agama, terutama dalam pengalaman agama Kristiani yang sangat beragam, yang memuncak pada bentuk perang sipil/perang saudara, *civil war*, yang berkepanjangan sehingga melelahkan dan akhirnya ditemukan sebuah kesepakatan untuk membangun keberagaman yang humanis dan dewasa dalam kerangka memajukan kehidupan sosial dan kebangsaan yang maju. Namun, di Perancis, menunjukkan fenomena yang ekstrem, dimana antara agama dan Negara mencapai batas sekularisasi yang paling menonjol di Eropa, dimana Negara tidak menjalin hubungan apapun dengan agama, dan agama tidak boleh ikut campur dengan kehidupan Negara. Dengan demikian, Perancis merupakan Negara paling sekuler di Eropa.

Ketiga penelitian ini membarikan informasi penting, namun ketiganya memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian ini. Penelitian kedua meski tentang majelis ta'lim namun bersifat action research yang diarahkan pada penguatan manajemen dan pencerdasan pola asuh. Sementara penelitian kedua dan ketiga

melihat ekpresi keberagaman secara umum. Adapun penelitian ini menfokuskan pada kelompok perempuan dengan menggunakan perspektif *women study* untuk mengupayakan peningkatan peran perempuan dalam bidang harmonisasi kehidupan beragama di Aceh.

## **B. Teori Terkait**

### **1. Majelis Taklim**

Majelis Ta'lim merupakan sekolah cerdas bagi masyarakat dan wadah untuk mendapatkan pendidikan agama Islam, merupakan tempat berlangsungnya pengajaran, pendidikan agama Islam yang paling fleksibel dan tidak terikat oleh tempat dan waktu. Fleksibelitas Majelis Taklim inilah yang menjadi kekuatan sehingga mampu bertahan sebagai lembaga pendidikan Islam nonformal yang paling dekat dengan umat (masyarakat). Majelis taklim juga merupakan wahana interaksi dan komunikasi yang kuat antara masyarakat dengan para *mu'allim* (guru agama) dan antara sesama anggota jamaah.

Dalam "*Regulasi Majelis Taklim; Pedoman Pembinaan Majelis Taklim*" (Depag RI: 2009), setidaknya ada sembilan fungsi dan peran Majelis Taklim yang dapat dikembangkan: *pertama*, memperkuat fungsi Majelis Taklim sebagai tempat pengajaran agama Islam secara luas, yang meliputi pengkajian tentang pokok-pokok ajaran Islam dan kaitannya dengan persoalan sehari-hari yang dihadapi oleh umat Islam itu sendiri. *Kedua*, meningkatkan fungsi Majelis Taklim dari tempat penyelenggaraan pengajian menjadi wahana melakukan kaderisasi umat Islam. Kaderisasi adalah suatu sistem menyiapkan generasi yang akan datang. *Ketiga*, mengembangkan fungsi konseling. Sebagai salah satu lembaga pendidikan non formal, Majelis Taklim bertanggung jawab untuk mendidik dan membantu

jamaahnya untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat serta mampu memecahkan berbagai persoalan hidup yang dihadapi. *Keempat*, menjadikan Majelis Taklim sebagai pusat pengembangan keterampilan atau *skill* jamaah. Setiap muslim idealnya mampu berperan ganda dalam kehidupannya, yaitu sebagai '*abid* (penyembah Allah) dan sekaligus sebagai *khalifah fil ardh* (orang yang memakmurkan bumi). *Kelima*, meningkatkan peran pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi dan sosial. Majelis Taklim bisa menjadi media sosial dalam mengkomunikasikan upaya-upaya pembangunan umat, baik secara lahir maupun batin. *Keenam*, menjadikan Majelis Taklim sebagai wadah silaturahmi dan rekreasi ruhani. *Ketujuh*, mengembangkan fungsi sebagai pusat komunikasi dan informasi. *Kedelapan*, mengembangkan peran sebagai tempat berkembangnya budaya Islam. *Kesembilan*, menjadikan Majelis Taklim sebagai lembaga kontrol sosial (*social control*). Dengan fungsi control ini, eksistensi Majelis Taklim akan semakin diperlukan di tengah-tengah masyarakat.

Sebuah fakta yang kerap ditemukan di gampong-gampong di Aceh adalah realitas kegiatan sosial kemanusiaan yang menjadi pilar interaksi masyarakat ini umumnya dilakoni oleh kelompok Majelis Taklim kaum ibu. Ini sering disimbolkan dengan "kunjungan sosial". Majelis Taklim kaum menjadi leading sektor yang memotori dan memanage berbagai rangkaian persiapan untuk kegiatan ini. Realitas diatas sebenarnya menggambarkan potensi yang besar dari Majelis Taklim kaum ibu untuk berpartisipasi dalam mengembangkan penguatan gampong yang berketahanan sosial.

Majelis Taklim ini merupakan potensi dan sumber daya yang perlu dikembangkan. Hanya saja potensi ini kerap kurang maksimal, misalnya karena kurangnya motivasi keagamaan para pengurus

Majlis Taklim, para pengurus tidak terinspirasi dengan kuat bahwa apa yang mereka lakukan dalam kegiatan Majelis Taklim merupakan wadah untuk kegiatan *amal makruf nahi mungkar*.

## 2. Inklusivisme dan Pluralitas

Pluralitas, baik plural secara eksternal dengan agama lain atau pluralitas di internal Islam sendiri, merupakan realitas alamiah. Di Indonesia terdapat enam agama yang diakui sebagai agama resmi negara. Namun dalam kenyataannya jumlah inipun semakin plural ketika berkombinasi dengan kultur, etnis, aliran, paham ataupun yang lainnya. *Heresiography* Amir Mihna dan Áli Kharis dalam kitab: *Jaami'al Firaq wa Madzahih Islamiyah* menyebutkan: "ditemukan berbagai sekte dan aliran dalam Islam yang jumlahnya lebih kurang 204 kelompok. Sebagian besar kelompok tersebut dapat dikatakan sebagai kelompok atau aliran pemikiran (*School of Thought*) belaka, seperti aliran Sunni menjadi mazhab Maliki, Hanafi, Syafii dan Hanbali. (M.Nasir Budiman, ed., 2007, ix).

Pluralitas ini merupakan bagian kekayaan kehidupan yang bermanfaat bagi masyarakat manusia. Namun fakta sejarah menunjukkan bahwa selain fakta positif terdapat juga fakta negatif sebagai akibat pluralitas agama, yaitu perpecahan dan konflik yang diawali dengan sikap eksklusif. Hendropuspito (1983, 151-152) menyebutkan ada 4 bentuk konflik sosial yang bersumber dari agama yaitu :

1. Perbedaan doktrin dan sikap: Dalam konteks ini konflik sebagai fakta sosial melibatkan minimal dua pihak (golongan) yang berbeda agama atau aliran, bukannya sebagai konstruksi khayal (konsepsional) melainkan sebagai fakta sejarah yang masih sering terjadi zaman sekarang juga.



2. Perbedaan suku ras dan pemeluk agama
3. Perbedaan tingkat kebudayaan: bahwa masyarakat yang berkebudayaan kuat cenderung lebih terbuka dan rasional dalam beragama sementara masyarakat yang berkebudayaan lemah cenderung fanatik dan emosional
4. Masalah mayoritas dan minoritas pemeluk agama.

Pluralisme yang muncul sebagai respon baru mensikapi pluraritas dengan semangat kebersamaan tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama. Karena pemahaman seperti ini akan justru mengedepankan kesan fragmentasi, perbedaan dan bukan pluralisme. Pluralisme juga tidak dapat dipahami sebagai upaya menghapuskan fanatisme. Pluralisme harus dipahami sebagai “pertalian sejati kebinekakaan dalam ikatan-ikatan keadaban” (*genuine engagement of diversities within the bonds of civility*) yaitu kesepakatan saling menghargai dalam perbedaan.

Keragaman pemahaman dalam Islam menuntut kearifan semua pihak dalam mensikapi perbedaan. Saling memahami adalah harapan yang tersembunyi dibalik klausul “perbedaan adalah rahmat”, dan kekerasan pastinya bukan terjemahan kata “*hikmah*” sebagai salah satu prinsip dakwah.

Potensi konflik karena pluralitas ini akan sangat rentan pecah jika tidak dikelola dengan baik apa lagi jika masing-masing bersikap eksklusif. Dalam perspektif Dahrendorf, dapat dianalisis bahwa tekanan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok yang dianggap diluar mainstream, justru akan menjadi penyebab terjadinya konflik, karena kelompok ini akan menguat dan

mewujudkan kesatuannya secara lebih jelas untuk mempertahankan kepentingannya yang mendapat tekanan.

Selanjutnya digunakan juga teori konflik untuk menilai potensi konflik yang berpeluang muncul dari kecenderungan disharmonisasi yang terjadi. Untuk ini digunakan teori konflik Randall Collins yang menyetengahkan 5 prinsip analisis konflik yaitu :

*First, the theory of conflict must focus on real life rather than on abstract formulations. Second, the conflict theory of stratification must examine carefully the composition of the material that affect the interaction. Third, in situations of inequality, the group that controls the resource will likely try to exploit groups with limited resources. Fourth, conflict theorists must look at cultural phenomena such as beliefs and ideas from the standpoint of the interests, resources and power. And fifth, the conflict theorists must make a firm commitment to conduct the scientific study of stratification and every other aspect of social life<sup>3</sup>*

---

<sup>3</sup>George Ritzer dan Douglas J Goddman, *Modern Sociological Theory*, Singapore: The Mc.GrawHill Companies, 1990, p.160-164

## **BAB III METODE DAN DESAIN PENELITIAN**

### **A. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang termasuk pada jenis penelitian Dasar dalam bidang Ilmu Dakwah. Penelitian ini dilakukan di Banda Aceh-Aceh Besar dan Aceh Barat Daya dengan pertimbangan daerah ini memiliki lebih banyak majelis ta'lim yang telah mendapatkan penguatan dari berbagai pihak. Sebagiannya telah mencoba mengembangkan kiprah dakwah damainya untuk membangun harmonisasi kehidupan beragama intra Islam. Perspektif penelitian ini adalah berperspektif gender dengan menggunakan metodologi penelitian studi wanita . Penelitian berperspektifi gender dengan metodologi studi wanita adalah penelitian/riset aksi yang merepresentasikan realitas perempuan, mengangkat prioritas kebutuhan perempuan, dan mengubah situasi untuk mewujudkan kesetaraan gender (Dr.Hesti R.Wijaya, 1996:21).

Sumber data penelitian ini adalah hasil wawancara mendalam dengan pengurus majelis ta'lim, dan tokoh masyarakat, FGD dengan masyarakat, dan hasil observasi terhadap kegiatan majelis ta'lim dan perilaku keagamaan di masyarakat.

Teknik pegumpulan data adalah dengan wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan observasi. Wawancara mendalam dan FGD dilakukan terhadap 20 pengurus majelis ta'lim, tokoh masyarakat dan masyarakat dari berbagai katagori kelompok, yang memiliki pengetahuan yang memadai terkait penguatan peran majelis ta'lim. Observasi dilakukan terhadap aktifitas di majelis ta'lim, dan kehidupan beragama intra Islam. Selanjutnya data dianalisa dengan analisis deskriptif.

## **B. Desain Penelitian**

Langkah penelitian ini adalah:

1. Melakukan review reference untuk menemukan berbagai informasi terkait penguatan peran majelis ta'lim dalam harmonisasi kehidupan beragama intra Islam di Aceh.
2. Mengidentifikasi majelis ta'lim yang relevan untuk diteliti. Sebagai pemetaan awal majelis ta'lim yang dipilih menggunakan data base Dinas Syariat Islam terkait Majelis Ta'lim yang didampingi, dan majelis ta'lim yang didampingi oleh Pusat Studi Wanita (PSW) UIN AR-Raniry. Data awal ini dikombinasikan dengan masukan tokoh masyarakat di kabupaten terkait.
3. Melakukan minimal satu kali FGD untuk pengidentifikasian awal terkait ragam isu disharmonisasi yang dialami kelompok perempuan, dan posisi majelis ta'lim dalam kontelasi upaya harmonisasi kehidupan beragama.
4. Melakukan Wawancara mendalam untuk menemukan peluang dan tantangan yang dihadapi majelis ta'lim.
5. Melakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat terkait posisi, peluang dan tantanag majelis ta'lim
6. Melakukan observasi selama proses wawancara pengurus majelis ta'lim dan tokoh masyarakat, ketika FGD dan pada kegiatan majelis.
7. Proses pengumpulan data dengan wawancara, FGD dan observasi dilaksanakan sejalan dengan pengolahan data terkait.
8. Hasil pengolahan data kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif.

## **C. Etika Penelitian**

Etika dalam penelitian ini dibangun dengan menerapkan prinsip transparansi dalam pengumpulan data, dan penggunaan data.

Prinsip ini diwujudkan dengan membangun kesepahaman yang jelas antara para pihak yang terlibat tentang maksud, tujuan, kegunaan penelitian serta arti kehadiran masing masing pihak dalam penelitian ini. Dengan demikian sejak awal penelitian, para pihak paham makna informasi yang diberikannya.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan akan dikembangkan dengan menggunakan perspektif gender dan studi wanita untuk melihat peluang penguatan peran kelompok perempuan di masyarakat dalam meminimalisir disharmonisasi intra islam. Untuk ini pembahasan akan diuraikan dalam lima bagian.

Bagian pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Bagian pendahuluan ini memberikan gambaran umum tentang apa dan bagaimana penelitian ini di jalankan.

Bagian kedua merupakan Kajian Kepustakaan dan Kerangka Konseptual. Pada bagian ini akan diketengahkan penelitian dahulu yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu diketengahkan juga teori terkait yang meliputi penjelasan seputar majelis taklim dan perannya berdasarkan ketentuan kebijakan. Diketengahkan juga pembahasan terkait inklusitas dan pluralisme.

Bagian Ketiga diketengahkan Metode penelitian yang mengetengahkan tentang metode penelitian yang digunakan, desain penelitian dan etika penelitian.

Bagian keempat merupakan paparan hasil penelitian dan pembahasan yang mendeskripsikan pengalaman kelompok perempuan terkait isu diharmonisasi kehidupan beragama intra Islam. Kemudian dideskripsikan posisi kelompok majelis taklim perempuan dalam kontelasi harmonisasi kehidupan beragama. Lalu

digambarkan bagaimana peluang dan tantangan penguatan peran majelis taklim untuk harmonisasi kehidupan beragama intra Islam di Aceh. Selanjutnya bagian terakhir, berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Konteks Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Wilayah Kabupaten Aceh Besar**

Kabupaten Aceh Besar adalah nama kabupaten di Provinsi Aceh. Sebelum dimekarkan pada akhir tahun 1970-an, ibu kota Kabupaten Aceh Besar adalah Kota Banda Aceh. Namun, setelah Kota Banda Aceh berpisah menjadi kotamadya tersendiri, ibukota kabupaten Aceh Besar dipindahkan ke Jantho di Pegunungan Seulawah.

Pada waktu Aceh masih sebagai sebuah kerajaan, yang dimaksud dengan Aceh atau Kerajaan Aceh adalah wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar ditambah dengan beberapa kenegerian/daerah yang telah menjadi bagian dari Kabupaten Pidie. Selain itu, juga termasuk Pulau Weh (sekarang telah menjadi pemerintah kota Sabang), sebagian wilayah pemerintah kota Banda Aceh, dan beberapa kenegerian/daerah dari wilayah Kabupaten Aceh Barat. Aceh Besar dalam istilah Aceh disebut *Aceh Rayeuk*. Penyebutan Aceh Rayeuk sebagai Aceh yang sebenarnya karena daerah inilah yang pada mulanya menjadi inti Kerajaan Aceh dan juga karena di situlah terletak ibukota kerajaan yang bernama Bandar Aceh atau Bandar Aceh Darussalam. Untuk nama Aceh Rayeuk ada juga yang menamakan dengan sebutan *Aceh Lhee Sagoe* (*Aceh Tiga Segi*).

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Kabupaten Aceh Besar merupakan daerah yang terdiri dari tiga kawedanan, yaitu Kawedanan Seulimum, Kawedanan Lhoknga dan Kawedanan Sabang. Akhirnya dengan perjuangan yang panjang Kabupaten Aceh besar disahkan menjadi daerah otonom melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 dengan ibu

kotanya pada waktu itu adalah Banda Aceh dan juga merupakan wilayah hukum Kotamadya Banda Aceh.

Sehubungan dengan tuntutan dan perkembangan daerah yang semakin maju dan berwawasan luas, Kota Banda Aceh sebagai ibu kota dianggap kurang efisien lagi, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Usaha pemindahan ibu kota tersebut dari Kota Banda Aceh mulai dirintis sejak tahun 1969, lokasi awalnya dipilih Kecamatan Indrapuri yang jaraknya 25 km dari Kota Banda Aceh. Usaha pemindahan tersebut belum berhasil dan belum dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan.

Kemudian pada tahun 1976 usaha perintisan pemindahan ibu kota untuk kedua kalinya mulai dilaksanakan lagi dengan memilih lokasi yang lain yaitu di Kecamatan Seulimeum tepatnya di kemukiman Janthoi yang jaraknya sekitar 52 km dari Kota Banda Aceh.

Akhirnya usaha yang terakhir ini berhasil dengan ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1976 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke kemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan Konsultan PT. Markam Jaya yang ditinjau dari segala aspek dapat disimpulkan bahwa yang dianggap memenuhi syarat sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar adalah Kemukiman Janthoi dengan nama Kota Jantho.

Setelah ditetapkan Kota Jantho sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar yang baru, maka secara bertahap pemindahan ibukota terus dimulai, dan akhirnya secara serentak seluruh aktivitas perkantoran resmi dipindahkan dari Banda Aceh ke Kota Jantho



pada tanggal 29 Agustus 1983, dan peresmianya dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Bapak Soepardjo Rustam pada tanggal 3 Mei 1984.

Di Kota Jantho hanya terdapat kompleks perumahan dan kantor-kantor pemerintahan, tidak ada losmen ataupun hotel. Kota Jantho dihubungkan dengan labi-labi dengan jarak 60 km dari Banda Aceh, 28 km menuju Saree, dan 12 km menuju jalan utama Banda Aceh - Medan. Kira-kira 12 km dari Kota Jantho ini terdapat air terjun.

Wilayah darat Aceh Besar berbatasan dengan Kota Banda Aceh di sisi Utara, Kabupaten Aceh Jaya di sebelah barat daya, serta Kabupaten Pidie di sisi selatan dan tenggara. Aceh Besar juga mempunyai wilayah kepulauan yaitu wilayah Kecamatan Pulo Aceh. Kabupaten Aceh Besar bagian kepulauan di sisi barat, timur dan utaranya dibatasi dengan Samudera Indonesia, Selat Malaka, dan Teluk Benggala, yang memisahkannya dengan Pulau Weh, tempat di mana Kota Sabang berada. Pulau-pulau utamanya adalah Pulau Breueh dan Pulau Nasi.

Secara geografis sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Besar berada pada hulu aliran Sungai Krueng Aceh. Saat ini kondisi tutupan lahan adalah 62,5% (menurut data citra landsat tahun 2007). Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda yang merupakan bandara internasional dan menjadi salah satu pintu gerbang untuk masuk ke Provinsi Aceh berada di wilayah kabupaten ini. Pulau Benggala yang merupakan pulau paling barat dalam wilayah Republik Indonesia merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Besar.

Kabupaten Aceh Besar memiliki 23 kecamatan di mana salah satunya berupa kepulauan yaitu kecamatan Pulo Aceh. Jumlah desa keseluruhannya mencapai 609 desa/kelurahan.

- Baitussalam (13 desa/kelurahan)	- Lembah Seulawah (12 desa/kelurahan)
-----------------------------------	---------------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blang Bintang (26 desa/kelurahan)</li> <li>- Darul Imarah (32 desa/kelurahan)</li> <li>- Darul Kamal (14 desa/kelurahan)</li> <li>- Darussalam (29 desa/kelurahan)</li> <li>- Indrapuri (52 desa/kelurahan)</li> <li>- Ingin Jaya (52 desa/kelurahan)</li> <li>- Kota Jantho (14 desa/kelurahan)</li> <li>- Krueng Barona Jaya (12 desa/kelurahan)</li> <li>- Kuta Baro (47 desa/kelurahan)</li> <li>- Kuta Cot Glie (32 desa/kelurahan)</li> <li>- Kuta Malaka (15 desa/kelurahan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leupung (6 desa/kelurahan)</li> <li>- Lhoknga (29 desa/kelurahan)</li> <li>- Lhoong (26 desa/kelurahan)</li> <li>- Masjid Raya (13 desa/kelurahan)</li> <li>- Montasik (40 desa/kelurahan)</li> <li>- Peukan Bada (26 desa/kelurahan)</li> <li>- Pulo Aceh (17 desa/kelurahan)</li> <li>- Seulimeum (47 desa/kelurahan)</li> <li>- Simpang Tiga (19 desa/kelurahan)</li> <li>- Suka Makmur (35 desa/kelurahan)</li> </ul>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2. Profil Wilayah Kabupaten Abdya

Kabupaten yang sering disingkat dengan singkatan "Abdya" ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan. Aceh Barat Daya sebagai hasil pemekaran bukanlah merupakan akibat dari reformasi pada tahun 1998. Meskipun perubahan pemerintahan nasional saat itu mempercepat pemekaran tersebut, namun wacana untuk pemekaran itu sendiri sudah berkembang sejak sekitar tahun 1960-an.

Kabupaten ini memiliki banyak sebutan di antaranya: *Tanoh Breuh Sigupai, Bumoe Teungku Peukan, Bumi Persada, Tanoh Mano Pucok, Bumi Cerana, Alue Malem Dewa* dan sebagainya.

Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki 9 kecamatan dan 152 gampong (dari total 289 kecamatan dan 6.497 gampong di seluruh Aceh). Per tahun 2017, jumlah penduduk di wilayah ini adalah 125.991 (dari penduduk seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 62.633 pria dan 63.358 wanita (rasio 98,86). Dengan luas daerah 188.205 ha (dibanding luas seluruh provinsi Aceh 5.677.081 ha), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 54 jiwa/km<sup>2</sup> (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km<sup>2</sup>). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 148.687 jiwa dengan luas wilayahnya 1.490,60 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 100 jiwa/km<sup>2</sup>.

Aceh Barat Daya mengandalkan sektor pertanian dan perdagangan untuk kelangsungan perekonomiannya. Hal ini ditunjang dengan posisinya yang sangat strategis di jalur dagang kawasan barat Aceh, khususnya kota Blangpidie yang sejak dulu menjadi pusat perdagangan di pantai barat Aceh. Sebenarnya bila kondisi keamanan semakin membaik, banyak sekali potensi yang dapat digali di kawasan ini, seperti pariwisata, karena posisinya yang merupakan paduan antara pantai Samudera Hindia dan Bukit Barisan yang hijau. Selain itu Aceh Barat Daya dapat dikembangkan sebagai kawasan agroindustri, agribisnis dan peternakan terpadu serta sektor lain yang akan berkembang.

Berikut pembagian kecamatan di kabupaten Aceh Barat Daya:

- Babahrot (1 Mukim, 7 desa/kelurahan), kode Pos 23767	- Manggeng (3 mukim, 18 desa/kelurahan), kode Pos 23762
- Blangpidie (4 Mukim, 20 desa/kelurahan), kode Pos 23764	- Setia (2 mukim, 6 desa/kelurahan), kode Pos 23763
- Jeumpa (4 Mukim, 10 desa/kelurahan), kode Pos 23765	- Susoh (4 mukim, 29 desa/kelurahan), kode Pos 23765
	- Tangan-Tangan (1 mukim, 15 desa/kelurahan), kode Pos 23761

desa/kelurahan), kode 23764	desa/kelurahan), kode Pos 23763
- Kuala Batee (3 mukim, 2 desa/kelurahan), kode 23766	
- Lembah Sabil (3 mukim desa/kelurahan), kode 23762.	

### 3. Profil Wilayah Kota Banda Aceh

Banda Aceh sebagai ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada abad ke-14. Kesultanan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha yang pernah ada sebelumnya, seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra, dan Kerajaan Indrapura (Indrapuri). Dari batu nisan Sultan Firman Syah, salah seorang sultan yang pernah memerintah Kesultanan Aceh, didapat keterangan bahwa Kesultanan Aceh beribu kota di Kutaraja (Banda Aceh).<sup>4</sup>

Kemunculan Kesultanan Aceh Darussalam yang beribu kota di Banda Aceh tidak lepas dari eksistensi Kerajaan Islam Lamuri. Pada akhir abad ke-15, dengan terjalinnya suatu hubungan baik dengan kerajaan tetangganya, maka pusat singgasana Lamuri dipindahkan ke Meukuta Alam. Lokasi istana Meukuta Alam berada di wilayah Banda Aceh.

Sultan Ali Mughayat Syah memerintah Kesultanan Aceh Darussalam yang beribu kota di Banda Aceh, hanya selama 10 tahun. Menurut prasasti yang ditemukan dari batu nisan Sultan Ali

---

<sup>4</sup> H. Mohammad Said, Aceh Sepanjang Abad, 198, hal .157

Mughayat Syah, pemimpin pertama Kesultanan Aceh Darussalam ini meninggal dunia pada 12 Dzulhijah Tahun 936 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 1530 Masehi. Kendati masa pemerintahan Sultan Mughayat Syah relatif singkat, namun ia berhasil membangun Banda Aceh sebagai pusat peradaban Islam di Asia Tenggara. Pada masa ini, Banda Aceh telah berevolusi menjadi salah satu kota pusat pertahanan yang ikut mengamankan jalur perdagangan maritim dan lalu lintas jemaah haji dari perompakan yang dilakukan armada Portugis.

Pada masa Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh tumbuh kembali sebagai pusat perdagangan maritim, khususnya untuk komoditas lada yang saat itu sangat tinggi permintaannya dari Eropa. Iskandar Muda menjadikan Banda Aceh sebagai taman dunia, yang dimulai dari kompleks istana. Komplek istana Kesultanan Aceh juga dinamai Darud Dunya (Taman Dunia).

Pada masa agresi kedua Belanda, terjadi evakuasi besar-besaran pasukan Aceh keluar dari Banda Aceh yang kemudian dirayakan oleh Van Swieten dengan memproklamasikan jatuhnya kesultanan Aceh dan mengubah nama Banda Aceh menjadi Kuta Raja. Setelah masuk dalam pangkuan Pemerintah Republik Indonesia baru sejak 28 Desember 1962 nama kota ini kembali diganti menjadi Banda Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 No. Des 52/1/43-43.

Letak astronomis Banda Aceh adalah 05°16'15"-05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15"-95°22'35" Bujur Timur dengan tinggi rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan, 17 mukim, 70 desa dan 20 kelurahan. Semula hanya ada 4 kecamatan di Kota Banda Aceh yaitu Meuraksa, Baiturrahman, Kuta Alam dan Syiah Kuala. Kota Banda Aceh kemudian dikembangkan

lagi menjadi 9 kecamatan baru dan 1 kecamatan baru yang akan digabung dari Kabupaten Aceh Besar, yaitu:

1. Baiturrahman
2. Banda Raya
3. Jaya Baru
4. Kuta Alam
5. Kuta Raja
6. Lueng Bata
7. Meuraksa
8. Syiah Kuala
9. Ulee Kareng
10. Darul Imarah

Kota Banda Aceh sebagai ibu kota dari Kesultanan Aceh Darussalam yang dahulunya merupakan salah satu dari lima Kerajaan Islam terbesar di dunia menyimpan berbagai situs peninggalan sejarah dari berbagai masa, mulai dari masa Kesultanan, masa Kolonial Belanda, masa bergabung dalam bingkai NKRI, masa konflik hingga tsunami. Berbagai situs objek wisata tersebut antara lain adalah Masjid Raya Baiturrahman, Komplek Taman Ghairah, Museum Sejarah Aceh, Museum Tsunami Aceh, Makam Sultan Iskandar Muda dan berbagai macam situs peninggalan sejarah lainnya terdapat di berbagai sudut kota Islam tertua di Asia Tenggara ini.

## **B. Isu Disharmonisasi Kehidupan Beragama Intra Islam yang Dialami Kaum Perempuan**

Munculnya beragam pemikiran, paham dan aliran intra Islam di satu sisi dapat dipahami sebagai hasil keterbukaan pembelajaran

intra Islam. Namun di sisi lain manakala ekspresi keberagaman kelompok tertentu mengusik kelompok lainnya, jika tidak segera difasilitasi penyelesaiannya maka cepat bergulir menjadi konflik horizontal, menyebabkan kekerasan dan tindakan anarkhis lainnya. Masyarakat menjadi massa konflik yang sulit terbendung dan mudah sekali terpancing untuk isu sensitif keagamaan yang sering dianggap sebagai pelecehan, atau aliran sesat.

Pemerintah dengan landasan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 dan 8 tahun 2006 telah mengembangkan paradigma penyelesaian berbasis masyarakat dengan mendorong berdirinya Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Semangat yang ingin dikedepankan adalah memperkuat kesadaran dan peran masyarakat untuk memelihara harmonisasi relasi antar agama. Kesadaran dan peran masyarakat ini pulalah seyogyanya yang harus diperkuat untuk memelihara harmonisasi relasi intra Islam. Keberadaan majelis ta'lim kaum ibu merupakan kekuatan penting untuk menstabilkan gejolak berbasis agama intra Islam. Akan tetapi sayangnya justru isu disharmonisasi ini juga melanda kelompok majelis ta'lim kaum ibu ini. Padahal menurut Ketua MPU Abdya, yang paling sering meramaikan majelis ta'lim adalah kaum perempuan.<sup>5</sup>

Hasil penelitian menunjukkan ada tiga isu disharmonisasi intra Islam yang dialami kelompok perempuan. Pertama, isu yang berasal dari perbedaan amalan furu' Nahdatul Ulama (NU), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) dan Muhammadiyah. Kedua disharmonisasi yang terkait dengan kelompok Salafi. Ketiga, isu yang bersumber dari pertentangan substansi pengajian antar teungku, lalu mengarah pada *truth claim*. Dalam hal ini termasuk juga isu yang

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ketua MPU Abdya, pada 24 Juli 2019 di Blang Pidie

bersumber dari perbedaan pemahaman peran publik perempuan, khususnya pada majelis ta'lim yang dipimpin oleh teungku inong. Untuk lebih jelasnya maka berikut akan diuraikan masing masing isu.

1. *Isu yang berasal dari perbedaan amalan furu'NU/PERTI<sup>6</sup> dan Muhammadiyah.*

Isu ini mengemuka di wilayah Aceh Barat Daya dengan peta potensi latent disharmonisasi antara Muhammadiyah-NU/PERTI. Meski hampir semua narasumber penelitian secara lisan menyebutkan tidak ada masalah disharmonisasi antara pengikut Muhammadiyah dan PERTI di Abdiya, namun terdapat pendapat juga sikap yang menunjukkan berbeda. Berikut merupakan beberapa pandangan narasumber terkait kondisi interaksi pengikut Muhammadiyah dan PERTI:

NO	Nara Sumber	Kutipan Wawancara
1	RR (Tokoh Perempuan)	Di Abdiya ini isu Muhammadiyah, PERTI, NU Nggak ada masalah sebab semua berbaur aja. Waktu Ustaz Abdu Somad datang diundang oleh orang NU, ramai juga Muhammadiyah yang hadir. Saya sendiri dari kalangan Muhammadiyah, suami dari NU, kalau pas bulan Ramadhan kami berpindah pindah mesjid kadang di Mesjid Taqwa 8 rakaat, dan kadang di mesjid lain yang 20 rakaat.
2	Kemenag Abdya Ka Sie Bimas	Memang ada pemahaman berbeda dan praktek ibadah Muhammadiyah dan PERTI .

---

<sup>6</sup> **Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti)** merupakan nama organisasi Islam nasional yang berawal di Sumatera Barat. PERTI berdiri pada 20 Mei 1930 di Sumatera Barat, oleh para ulama Ahlussunnah wal jamaah. Selanjutnya organisasi PERTI meluas hingga ke daerah lain di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.



	Islam Roni Hadi, Lc	<p>Seluruh kecamatan ada Muhammadiyah dan PERTI. Secara administrasi organisasi PERTI tidak serapi Muhammadiyah, tetapi secara gerakan kultural PERTI lebih massif. Indikatornya: pada pelaksanaan Shalat Tarawih, lebih banyak mesjid 20 rakaat dari pada yang 8 rakaat.</p> <p>Selama ini perbedaan tidak ada masalah. contoh sample di Kecamatan Susoh, di daerah pantai seperti Pawoh, P Hilir lebih banyak Muhammadiyah, ada orang meninggal semua paham bahwa tidak adanya kenduri.</p>
3	Uh, salah seorang Penceramah dari kalangan Muhammadiyah	<p>Masyarakat disini tidak ada masalah antara Muhammadiyah dan PERTI. Misalnya saya diundang ceramah pada saat ta'ziah, sudah dipahami bahwa habis maghrib akan diawali dengan Samadiyah dulu (kebiasaan kalangan PERTI), lalu diikuti kebiasaan kalangan Muhammadiyah yaitu ceramah ta'ziah. Peserta samadiyah biasanya juga tidak pulang jika selesai samadiyah, akan tetapi juga ikut mendengar ceramah dari kalangan Muhammadiyah.</p>
4.	Ketua MPU Abdy	<p>Kalau di Abdy sini tidak ada masalah ataupun kasus kasus disharmonisasi apa lagi bagi kaum ibu ibu. Kelompok PERTI dan Muhammadiyah kami damai di sini.</p>
5	Mantan Ketua MPU Abdy	<p>PERTI dan NU sama sama beraqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU yg lama dipergunakan barang baru juga dipergunakan, Kalau PERTI banyak mempertahankan yang lama, yang baru di lihat dulu. Muhammadiyah ada</p>

		pembaharuan. Tetapi dalam sehari hari tidak ada masalah. Ada juga keluarga yang suami NU dan istri dari kalangan Muhammadiyah, atau sebaliknya. Ada juga keluarga yang meninggal yang buat dua dua: samadiyah (kebiasaan NU dan PERTI), juga buat juga ceramah (untuk kalangan Muhammadiyah)
6	Salah Seorang Anggota MAA Abdya	Kalau di Abdya sini, aman aman saja antara Muhammadiyah, PERTI dan NU. Rasa rasanya nggak ada apa apapun, semua biasa aja. Hampir nggak ada masalah
7	Mr. Pengurus Aisyiah Abdya	Ada juga sekarang pengajian yang ajarkan kenduri Maulid tidak boleh. Lalu berkembang isu yang bilang orang Muhammadiyah, padahal nggak ada orang Muhammadiyah. Dibilang Wahabi dan Muhammadiyah dibilang Wahabi juga (narasumber tertawa kecil mentertawakan realitas yang dia ceritakan)
8	Pengurus Pengajian Kaum Ibu dari kalangan Muhammadiyah	Kalau menurut kami di Blang Pidie dan Susoh kami harmonis saja bu. Kami juga beraktifitas bersama silaturahmi ada di Aisyiah juga di PKK, tidak ada yang berbeda bedakan semua sama apa Muhammadiyah atau PERTI. Tidak ada juga yang mempersalahkan kalau ada yang melakukan ini atau ibadah apa begitu tidak ada yang mempersalahkan. Misalnya kematian kalau Muhammadiyah kita kan tidak membesar besar kan, tapi di PERTI kan ada kenduri 7 ada 14 ada 40, tapi kita kan tetangga bu..tidak semua keluarga dan tetangga Muhammadiyah dan tidak semua keluarga kita PERTI. Jadi ya saling pahami
9	Pengurus	Kalau kami dari Babahrot ke Lembah Sambil

	<p>Pengajian Kaum Ibu dari kalangan PERTI</p>	<p>belum pernah mendengar Muhammadiyah dan PERTI beda nggak ada. Kalau ada yang meninggal kalau PERTI kan kenduri sampai 7 hari, kalau yang Muhammadiyah air putih pun kadang nggak ada. Begitu bawa jenazah dah diam gitu aja. Kami pun yang ngunjung dah diam nggak ada mempersalahkan, karena sudah tahu. Misalnya kami mau pergi takziah kami tanya misalnya PERTI apa Muhammadiyah? Kalau Muhammadiyah kami dah paham aja salam aja. Kalau PERTI sebelum kita minum teh paling kurang nggak dikasih pulang.</p>
<p>10</p>	<p>Pada FGD dengan 14 orang pengurus pengajian kaum ibu di Abdiya</p>	<p>Selama FGD secara umum semua peserta ingin memastikan bahwa tidak ada masalah disharmonisasi di Abdiya, akan tetapi ketika salah seorang pengurus pengajian dari kalangan Muhammadiyah menyinggung persoalan kenduri kematian, bahwa ada sampai yang berhutang, menggadaikan tanah, dan menyayangkan jika ada anak yatim yang ditinggalkan, lalu secara terburu buru dan sedikit tinggi suara, pengurus pengajian dari kalangan PERTI berkata: “oo tidak begitu, kalau kami buat kenduri, tidak sepeser pun sumbangan yatim kami pakai untuk kenduri. Itu memang untuk yatim. Untuk kenduri memang ditanggung bersama”. Peserta lain menimpali (juga dari kalangan PERTI), biasanya kalau ada kenduri meninggal misalnya, lalu ada keluarga bawa minuman sampai berkotak kotak, kan nggak lucu kalau kita simpan aja”. Beberapa pengurus juga turut berargumentasi membantah ungkapan pengurus pengajian tersebut. Pada akhirnya pengurus pengajian dari kalangan</p>

		Muhammadiyah memilih diam. Sekilas tampak ia ingin menimpali, tapi kemudian memilih untuk diam.
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Secara umum ada kearifan lokal yang terpelihara di Abdya, yaitu semangat untuk memelihara harmonisasi kehidupan, meski pada beberapa hal furu' terjadi perbedaan mendasar dalam syariat yang dipahami NU-PERTI dengan Muhammadiyah. Namun pada realitasnya, masing masing kelompok saling menahan diri untuk tidak saling mengomentari perbedaan ini. Hal inilah yang disampaikan Mr ketika menyebutkan dengan terkejut bahwa ada yang bilang "Muhammadiyah melarang kenduri maulid. Padahal Muhammadiyah tidak ada bilang begitu". Meski konsep itu memang ada dalam pemahaman di Muhammadiyah, namun hal ini hanya untuk kalangan internal dan Mr terlihat mengkhawatirkan jika hal ini sampai didengar oleh kelompok yang lain.

Bagi masyarakat awam perbedaan ini memang tidak mengemuka, tidak dianggap penting, sehingga tidak begitu dipersoalkan. Situasi ini tergolong rentan, karena jika suatu saat terpapar *truth claim*, maka mudah sekali untuk terpengaruh, atau membenci kelompok berbeda. Akan tetapi bagi pengurus pengajian yang memiliki kepentingan memelihara peserta pengajiannya, perbedaan ini dipahami dengan baik. Tetapi ada semangat, yang tampak jelas dari kalangan Muhammadiyah, NU, dan PERTI untuk tidak membuat persinggungan.

Sementara untuk di Banda Aceh dimana aktifitas da'wah muhammadiyah juga tinggi, terdapat beberapa penceramah yang mau menjelaskan dengan sudut pandang positif terhadap keberagaman ini. Lebih lebih pasca menguatnya isu aliran sesat dan

menyesatkan. RI, salah seorang Teungku Inong dari kalangan NU yang biasa berceramah di MT kota Banda Aceh menyebutkan:

Ada juga orang yang bilang bilang untuk ini muhammadiyah secara negatif. Maka jadi kewajiban kita untuk menyampaikan dengan benar: Muhammadiyah itu *peu barang?* (bahasa Aceh, artinya Muhammadiyah itu apa?), NU *peu barang?*. Jadi tentang Muhammadiyah, NU, PERTI kita hrs sampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat paham. Ooo ternyata Muhammadiyah itu bukan agama baru. Selama ini masyarakat cepat menolak karena nggak paham. Jadi misal karena saya nggak paham, maka yang terjadi lalu saling meyalahkan. Kalau sudah terjadi begini, dimana kita jadi terpecah pecah, *gob yang pok pok jaroe* (Bahasa Aceh, artinya: orang lain (di luar Islam) yang akan bertepuk tangan).<sup>7</sup>

Kesadaran menjaga silaturahmi menguat di beberapa penceramah kaum ibu, akan tetapi konteks Banda Aceh dan Aceh besar, tidak sesederhana Abdya. Ada banyak kepentingan kelompok yang berkolaborasi dengan perbedaan ajaran Islam ini sehingga sulit sekali memetakan situasinya secara jelas. RI, menyebutkan: selain itu ada pula kelompok yang memang memiliki niat lain untuk memanaskan suasana. Niatnya adalah "*beu i lop pateng lam bara*" (Bahasa Aceh, artinya apa yang disampaikan harus bisa diterima sepenuhnya oleh pendengar). Dengan kondisi ini maka isu disharmonisasi pada konteks Banda Aceh dan Aceh Besar, harus lebih diseriisi.

2. *Selanjutnya adalah disharmonisasi antara Muhammadiyah-PERTI berhadapan dengan Salafi/wahabi.*

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan RI, Tgku Inong penceramah MT kaum Ibu Banda Aceh, di Banda Aceh, 9 September 2019

Kondisi ini ditemukan di Abdya, Banda Aceh dan Aceh Besar dengan respon berbeda. Pada situasi Abdya dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak di banding Banda Aceh dan Aceh Besar, perbedaan atau hal yang baru dapat dengan mudah di petakan. Ketua MPU Abdya menyebutkan:

“ada dua titik pengajian Salafi yang ada di Abdiya yaitu di Geulumpang Payung dan Susoh. Cirinya adalah sangat mudah mensyirikkan orang, dan membid’ahkan orang. Secara fisik berjanggut dengan celana panjang agak gantung. Mereka bukan dari kelompok mana mana, tapi kelompok baru, Muhammadiyah juga benci juga dengan mereka itu”. Untuk Salafi ini telah ada fatwa MPU Aceh yaitu “sesat menyesatkan”<sup>8</sup>. Dimana setelah diperiksa oleh MPU ajaran salafi ini berbeda dari segi aqidah dan syariah. Dari segi aqidah ada ajarannya bahwa Allah ada tempat di Arasy.”<sup>9</sup> Mantan

---

<sup>8</sup> Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah melarang pengajian, dan kegiatan lainnya yang dilakukan kelompok “salafi” yang menyimpang. Pernyataan bahwa kelompok Salafi menyimpang dituangkan pada Fatwa MPU Aceh Nomor 9 tahun 2014, tentang pemahaman, pemikiran, pengamalan dan penyiaran agama Islam di Aceh. “Fatwa MPU Aceh dikeluarkan terhadap ajaran Salafi itu dilakukan setelah beberapa pengkajian bersama 47 ulama, yang berada di kabupaten/kota, termasuk beberapa kali pertemuan dengan pimpinan Salafi,” kata Ghazali Mohd Syam. Ada 4 poin di aqidah dan lima poin di ibadah yang ajarannya bertentangan dengan ajaran agama Islam,” terang Wakil Ketua MPU Aceh, Prof. Dr. Tgk. H Muslim Ibrahim, MA. Empat poin di aqidah yang sesat yakni mengimani zat Allah hanya di atas langit (Arasy), mengimani zat Allah terikat dengan waktu, tempat dan arah, mengimani kalamullah itu berhuruf dan bersuara dan mengimani Nabi Adam AS dan Nabi Idris AS bukan Rasulullah. Sedangkan di ibadah yang salah adalah membolehkan niat salat di luar takbiratul ihram, mengharamkan baca qunut pada shalat Subuh, mengharamkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, haram berzikir dan berdoa berjama’ah, serta wajib mengikuti hanya Alquran dan hadist dalam bidang aqidah, syariah dan akhlak. Tgk H Faisal Ali yang juga menjabat Wakil Ketua MPU Aceh, mengatakan, kelompok Salafi “Yang besar ada di Banda Aceh dan Aceh Besar (kawasan Lampeuneurut),” diakses pada 3 Oktober 2019 dari <https://mpu.acehprov.go.id/index.php>. Fatwa ini telah direspon oleh kelompok salafi diantaranya melalui media serambi on line yang intinya membatah dan menganggap MPU salah dalam menilai ajaran Salafi. Bantahan juga disampaikan dengan beberapa pernyataan ilmiah. Baca selengkapnya di <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/news/read/2014/08/24/14/mpu-aceh-larang-pengajian-kelompok-menyimpang.html>.

<sup>9</sup> Wawancara dengan ketua MPU Abdya di Blang Pidie pada 24 Juli 2019

Ketua MPU menambahkan: “jadi dipahami ada kursi seperti kursi dan duduknya manusia”.<sup>10</sup>

Apa yang dipahami oleh beberapa narasumber senada dengan pemahaman MPU ketika mengeluarkan Fatwa tentang sesatnya Salafi tahun 2014. Terkait ini, kelompok Salafi telah pula mengirimkan klarifikasinya secara terbuka salah satunya melalui media serambi on.line berikut:

Berikut lima klarifikasi dari pihak Salafi Aceh:

1. Interpretasi MPU terhadap aqidah salafi tidak sesuai dengan diyakini salafi. Fatwa tersebut tidak dibangun melalui dialogisme. MPU tidak pernah memberikan ruang untuk menjelaskan keyakinan salafi secara detail. Dialog yang diadakan MPU sebelumnya bersifat interogatif, kesimpulannya ditetapkan sepihak atau monologis.
2. Bahwa salafi meyakini Allah “hanya” di atas `Arasy, ini adalah tuduhan yang tidak benar. Salafi tidak pernah mengatakan bahwa Allah “hanya” di atas `Arasy, namun kita meyakini bahwa Allah tinggi di atas `Arasy sesuai dengan kemuliaannya dan tidak menyerupai makhluknya, dan tidak pula dibatasi oleh tempat, arah (jihah), dan waktu. (Lihat QS Al-an’am : 61, Q.S. Thaha : 5, dan QS As-syura : 11).
3. Pernyataan bahwa Salafi mengatakan bahwa Adam as. dan Idris as. bukan nabi dan bukan rasul, ini tidak benar. Kami meyakini bahwa Nabi Adam as. dan Nabi Idris as. adalah Nabi Allah dan utusan-Nya. Adapun terkait apakah Nabi Adam dan Idris adalah termasuk rasul atau bukan, maka di kalangan ulama ini terjadi khilafiah, dan kami tidak keberatan untuk mengatakan bahwa Adam dan Idris juga termasuk sebagai rasul, hanya saja kita lebih cenderung meyakini bahwa Adam dan Idris hanyalah Nabi Allah.
4. Adapun masalah seperti Qunut Subuh, Zikir dan doa jamaah, serta maulid Nabi adalah masalah khilafiah. Kami yakini bahwa tidak ada dalil Alquran dan hadist shahih yang mensyariatkannya. Namun kita tidak pernah memaksa keyakinan kita kepada pihak lain, apalagi melarang orang lain untuk melaksanakan keyakinannya.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan ketua MPU Abdya di Blang Pidie pada 24 Juli 2019

5. Kami berharap pihak MPU dapat mengadakan dialog secara terbuka yang benar-benar dialogis dengan pihak Salafi. Dan bila pihak MPU tidak bersedia, kami berharap pihak pemerintah daerah dapat turun tangan guna memfasilitasi kami untuk berdialog secara terbuka dengan MPU, agar kesalah pahaman MPU terhadap salafi dapat segera diluruskan.<sup>11</sup>

Menurut Rony (Kasie Bimas Islam Kemenag Abdya), awalnya tidak ada masalah disharmonisasi, tapi belakangan ini (suara narasumber mengecil) muncul aliran Salafi (orang dayah menyebutnya wahabi) yang telah membuat pengajian di dua titik di Blang Pidie. Rata rata mereka adalah pemuda dan remaja yg haus ilmu, haus kajian. inilah yang agak bergejolak sedikit. Dari MPU ada datang ke Kemenag, terlibat juga Polres dan Kodim. Kalau masyarakat di lokasi pengajian, tidak mau terima bahkan ada semacam diskusi terbuka yg diundang mereka. sistemnya didekati orang berpengaruh yang punya akses ke mesjid tertentu, lalu mulai pengajiannya. Pematerinya dari Medan, Jakarta, Tapak Tuan, Meulaboh, Pengajian ini menyentuh wilayah perbedaan.<sup>12</sup>

Rony menambahkan, di satu sisi ada hal positif yang dikembangkan melalui kelompok salafi ini, yaitu pemberdayaan ekonomi, anggota pengajiannya diberi pekerjaan. Namun dari segi strategi menurut Rony, kelompok ini telah salah. Baru beberapa bulan hadir di Abdya, kelompok salafi ini sudah membahas titik persinggungan yang selama ini selalu di jaga oleh Muhamadiyah, PERTI dan NU. Peringatan Maulid disebut bid'ah, pakaian pengikutnya berubah. Menurutnya, banyak alumni Timur Tengah yang aktif di kelompok ini, khususnya alumni Yaman, mereka ada juga mengaji dan Talakki dengan syeikhnya.

---

<sup>11</sup> Diakses pada 2 Oktober 2019 dari <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/news/read/2014/08/24/14/mpu-aceh-larang-pengajian-kelompok-menyimpang.html>

<sup>12</sup> Wawancara dengan Kasie Bimas Kemeneag Abdya di Blang Pidie, 24 Juli 2019



Keberadaan salafi di Abdya menjadi sangat kontras dengan pengajian lainnya sehingga jelas tertangkap perbedaannya. Ajaran yang juga disertai dengan simbol identitas menjadikan kelompoknya mudah terdeteksi. Pengurus Aisyiah Mr, menyebutkan

“anggota pengajian ini yang perempuan tidak boleh lagi berbedak, berlipstik. Di rumah tidak boleh ada foto foto dan gambar. Kalau laki laki pakai celana panjang gantung. Awalnya mereka ini ada yang ikut di Banda Aceh, lalu buat pengajian di Abdya undang yang di Banda Aceh, terus begitu perlahan jadi lebih ramai. Pengajiannya seperti biasa aja, tapi substansi pengajiannya yang berbeda Ada yang bilang bilang ini wahabi, tapi ada juga yang bilang wahabi ini Muhammadiyah. Memang ada juga anggota Muhammadiyah yang ikut ikut, tapi mereka ini yang kurang dasar agamanya, sementara yang kuat dasar agamanya tidak terpengaruh lagi.”<sup>13</sup>

Kesalah pahaman yang berkembang ini cepat direspon oleh MPU dengan bertanya ke pimpinan Muhammadiyah tentang hal ini, sehingga memperoleh jawaban bahwa Muhammadiyah sama sekali tidak ada kaitan dengan kelompok ini. Bahkan menurut ketua MPU Muhammadiyah juga membenci hal ini. Disebutkan bahwa yang ikut pengajian ini ada dari kalangan Muhammadiyah, dan ada dari kalangan NU.<sup>14</sup>

Kondisi di atas menggambarkan isu disharmonisasi yang dialami kelompok perempuan baik yang bergabung dalam NU, PERTI ataupun Muhammadiyah dikarenakan munculnya kelompok baru yang disebut sebut sebagai salafi. Keresahan muncul terutama dengan masuknya beberapa anggota kerabat dalam pengajian, lalu berubah penampilan, berubah cara pandang terhadap agama. Perubahan dan hal hal baru lainnya, turut juga mendorong beberapa orang untuk menghadiri pengajian salafi ini, karena ingin tahu. Ada

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Mr Pengurus Aisyiah Wilayah Abdya

<sup>14</sup> Wawancara dengan ketua MPU Abdya 24 Juli 2019 di Blang Pidie

yang kemudian berhenti setelah sekali datang, dan ada yang terus berlanjut. Sebagian narasumber penelitian meyakini bahwa masyarakat yang terpengaruh dengan pengajian ini adalah yang tidak kuat dasar agamanya, sementara yang kuat dasarnya tidak terpengaruh dengan hal ini. Akan tetapi secara umum apa yang disampaikan di pengajian salafi ini terkesan asing bagi nara sumber pengurus majelis taklim.

Hal mendasar yang meresahkan juga adalah klaim haram dari kelompok Salafi terhadap amalan yang telah mengakar di masyarakat Aceh, seperti menyebut bahwa Peringatan Maulid adalah haram. Sementara dalam keyakinan masyarakat Aceh, bulan maulid diperingati sepanjang 100 hari dengan kenduri di rumah, di meunasah, di mesjid, tabligh akbar, shalawatan, dll. Peringatan Maulid sangat ditunggu tunggu oleh masyarakat dan diyakini bersedekah makanan melalui kanduri maulid merupakan sedeqah yang mencerminkan kecintaan kepada Rasulullah sehingga sangat besar pahalanya. Praktek yang telah berjalan lama dan mengakar inilah yang salah satunya di gugat oleh kelompok salafi sebagai praktek yang bid'ah<sup>15</sup>. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Roni (kasie Bimas Kemenag Abdyah bahwa secara strategi yang digunakan oleh kelompok Salafi inilah yang memicu penolakan, dimana dalam waktu yang masih sangat baru kelompok ini sudah

---

<sup>15</sup> Bidah secara etimologi, berasal dari kata *bada'a: bad' al-shay' yabda'uh bad'an wa ibtada'ah* yang berarti mengadakan, menjadikan, menciptakan dan memulai. Selanjutnya kata *al-bad'i' dan al-bid'u* adalah sesuatu yang pertama. Adapun al-Bid'ah: *al-hadas wa ma ubtudi' min al-din ba'd ikmal*, yaitu sesuatu yang baru yang merupakan permasalahan agama, setelah agama dinyatakan sempurna. Lihat Ibn Manzûr, *Lisân al-'Arab*, Vol. 8 (Beirut: Dâr Shâdir, 1414 H), 6. Secara epistemologi, menurut Ibn Taymiyah *bid'ah* adalah hal yang bertentangan dengan teks-teks agama (*nusyûs*). Al-'Iz bin 'Abd al-Salâm mendefinisikan bidah sebagai mengerjakan sesuatu yang tidak ada dan tidak dikenal di zaman Nabi. Baca 'Abd Ilâh bin Husayn al-'Afrâj, *Konsep Bid'ah dan Toleransi Fiqih*, terj. Mohamad Taufiq Q. Hulaimi dkk. (Jakarta: Al-'Itishom, 2013), 12.

mengharamkan banyak praktek yang mengakar dalam masyarakat Aceh. Beda dengan kondisi antara Muhammadiyah, PERTI dan NU, meski banyak perbedaan, ketiganya menahan diri untuk tidak menyinggung praktik praktik yang berbeda

Berbeda dengan Aceh Barat Daya, konteks isu salafi telah ada sejak lama di Banda Aceh dan Aceh Besar, dan semakin menguat akhir akhir ini. Fi salah seorang anggota MPU Aceh menyebutkan bahwa kelompok Salafi yang besar ada di Banda Aceh dan Aceh Besar<sup>16</sup>. Dalam perspektif sosiologi, hal ini dapat dimaklumi, mengingat Kota Banda Aceh adalah pusat pemerintahan provinsi Aceh, sehingga sebagian besar resources terkumpul di Kota ini, termasuk di wilayah sekitarnya yaitu Aceh Besar. Ragam pengajian berkembang dan bermunculan dengan cepat di daerah ini. Akan tetapi menurut Rh<sup>17</sup>, salah seorang Teungku Inong, pimpinan dayah yang telah 20 tahun lebih berceramah di banyak Majelis Ta'lim kaum ibu: sejauh ini yang tetap mampu bertahan lama di tangan masyarakat bawah khususnya adalah alumni dayah dengan pemikiran yang mainstream dengan praktik keagamaan masyarakat. Masyarakat menurutnya selektif, dengan memilih teungku ngaji dengan mempertimbangkan: lepasan atau alumni mana? Alumni Samalanga dan Labuhan Haji menurutnya disenangi masyarakat kampung. Masyarakat juga selektif terkait mazhab apa dan aqidahnya apa?. Bahkan alumni UIN juga tidak mudah diterima di pedesaan, katanya. Terkait banyaknya pemahaman keagamaan saat ini, Rh memandangnya secara positif dengan merujuk "perbedaan adalah rahmat". Harus melihat apa yang berbeda, bukan serta merta

---

16

Baca:

<https://mpu.acehprov.go.id/index.php/news/read/2014/08/24/14/mpu-aceh-larang-pengajian-kelompok-menyimpang.html>

<sup>17</sup> Wawancara dengan Rh, teungku inong dan pimpinan dayah yang menjadi penceramah di beberapa majelis ta'lim kaum ibu, 7 September 2019 di Aceh Besar

menghakimi. Duduk bersama, tanyalah lihatlah, apa masalahnya? Statement ini diarahkan narasumber untuk merespon perbedaan ajaran yang dikembangkan oleh kelompok salafi dengan harapan kelompok salafi harus lebih bijak melihat situasi. Rh menyebutkan:

Sebenarnya tidak masalah pengajian jika ada perbedaan, semestinya juga tidak jadi masalah. Apa lagi pada hal hal yang terkait sunnah, anjuran yang tidak tergolong hal pokok. Contohnya: Kita pergi ke tempat orang meninggal, di hadapan jenazah, ada teungku yang mengajarkan sebaiknya dianjurkan berdoa, berzikir saja di dalam hati sebagai bentuk *tadabbur*. Sementara masyarakat sejak lama mempraktekkan baca shalawat, Surat Yasin walau mayat masih ada. Ini kondisi yang berbeda dengan yang disampaikan teungku tersebut, yang mengajarkan supaya diam dan bertadabbur. Saya paham dan tahu yang disampaikan teungku tersebut benar, tapi masyarakat awam ini tidak bisa dia, tidak bisa bertadabbur, melainkan bercerita, mengobrol, dan ribut di sana. Maka dari dulu dulu masyarakat mengaji Yasin, jadi ada positifnya. Tapi karena teungku ini membuat maklumat tentang ini, maka berbenturan lah, kacaulah dan bingung masyarakat. Kalau saya lebih memilih mengalah, benar yang beliau bilang, kalau kita sanggup mengambil pelajaran maka ini terbaik, tapi orang awam ini tidak begitu mereka, malah mengobrol dan ini bisa melukai keluarga yang sedang musibah. Maka lebih baik mengaji Yasin dapat mengobati kesedihan keluarga yang musibah. Tapi teungku tersebut tidak melihat ini malah saling memojokkan pemahaman yang lama.<sup>18</sup>

Bagi Rh selaku Tgk. Inong, persoalan isu disharmonisasi terkait salafi dan wahabi adalah pada tataran kegelisahan yang muncul di masyarakat karena ajaran baru yang disampaikan kelompok salafi

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Rh, teungku inong dan pimpinan dayah yang menjadi penceramah di beberapa majelis ta'lim kaum ibu, 7 September 2019 di Aceh Besar

telah membuat masyarakat gamang tentang mana yang benar dan salah, sehingga menimbulkan perpecahan. Akan tetapi di lain sisi Rh juga terkesan tidak mendukung sikap yang tidak berdasar dalam merespon isu wahabi yang berkembang di Aceh. Menurutnyanya:

Kadang kadang kita ini ada pendapat yang sedikit berbeda sudah di bilang wahabi. Bagaimana mendefenisikan wahabi? Yang berjenggot seperti suami saya itu wahabi? Orang alumni Universitas Islam Negeri (UIN) juga disebut wahabi? Anak anak bersorak oooo wahabi ...wahabi lewat di depan dayah saya. (maksudnya anak anak lain menyebut anak anak di dayah Rh sebagai anak anak wahabi). Saya bilang, nak jangan di balas, tapi mereka marah juga dengan ejekan ini. Saya bilang sama santri saya, yang ilang alumni UIN wahabi, itu salah bukan begitu wahabi. Saya jelaskan pelan pelan, saya sebut umi pun nggak pasti juga yang mana saja wahabi. Lama lama ada juga beberapa wali yang khawatir dan pindahkan anak dari sini. Nah inilah yang terjadi di kampung kampung, istilah wahabi malah digunakan untuk menjatuhkan pihak atau orang yang berbeda dengan dia.<sup>19</sup>

Apa yang digambarkan Rh menunjukkan ada “keresahan buta” di masyarakat khususnya kaum ibu terhadap isu wahabi. Dibanding isu salafi, isu wahabi tampak lebih meresahkan masyarakat. Ada konotasi negatif yang dihembuskan sebagai wacana publik terkait wahabi, sampai sekelompok anak anak menggunakan kata “wahabi” sebagai cemoohan. Lalu sekelompok anak lainnya merasa malu dan marah atas cemoohan ini seolah tahu bahwa wahabi yang dicemoohkan ke mereka adalah hal yang buruk. Sekelompok ibu turut pula termakan dan memindahkan anak ke dayah yang lain. “Keresahan buta” juga tampak dari ungkapan salah seorang

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Rh, teungku inong dan pimpinan dayah yang menjadi penceramah di beberapa majelis ta’lim kaum ibu, 7 September 2019 di Aceh Besar

pengurus MT di Aceh Besar yang mengatakan dengan berbisik sarat emosif “hati hati dengan Muhammadiyah bu..itu wahabi”. Ketika ditanya kenapa? Dijawab “sesat”. Lalu ditanya lagi sesat bagaimana? Jawabnya, “pokoknya begitu yang dibilang teungku”. Salah seorang tokoh masyarakat yang diwawancarai di Aceh Besar, Ms, malah bertanya kepada peneliti, “apa sebenarnya salafi itu? Kenapa orang orang memepersalahkan? Bukannya ada istilah dayah salafi, atau bagaimana?”<sup>20</sup>. Pertanyaan Ms ini mengindikasikan keawaman masyarakat terkait isu salafi, bahkan mereka juga masih mempertanyakan kenapa hal ini menjadi masalah?. Keresahan buta ini juga ditegaskan oleh Rt, anggota MPU provinsi Aceh:

MT kaum ibu di Kota Banda Aceh, biasanya lebih pasif menerima perbedaan dan lebih memilih mengambil langkah diam. Kecuali sudah *ta yok yok...*(Bahasa Aceh, maksudnya: sudah kita dorong dan desak). Pengen cari tahu? Nggak ada. Kebanyakan masih besifat seperti *sami'na wa ata'na* (artinya: kami dengar, lalu kami mematuhinya) atau *sami'na wanasiina* (artinya: kami dengar, tapi kami lalu lupa). Contohnya: begitu masuk ke kontent serius saja, mau diskusi kita dengan mereka, kita stagnan mereka nggak ada bahan untuk berdiskusi selain mendengarkan saja. Padahal ini pengurus. Sekarang lebih parah lagi karena ibu ibu merasa nggak perlu lagi baca buku, sebab sudah dengar TV dan internet. Ini krn berawal dari nggak ada alat alat canggih seperti android, dll, lalu sekarang ada ini dan itu alat alat canggih (dengan segala fitur unik dan lengkap). Sementara pendidikan kaum ibu ini terbatas.<sup>21</sup>

Apa yang disampaikan Rt, menegaskan bahwa sebenarnya di level pengajian ibu ibu ini, polemiknya tidak sampai menjangkau isu yang berat berat sekali seperti sesat dan menyesatkan, melainkan lebih kepada kebingungan terkait mana yang benar dan layak diamalkan.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ms, Tokoh Agama di Aceh Besar, Banda Aceh, 1 September 2019

<sup>21</sup> Wawancara dengan Rt, anggota MPU Aceh di Banda Aceh, pada 8 September 2019

Tidak jarang akhirnya mereka mengabaikan informasi baru ini karena bingung. Rt menyampaikan:

Jadi respon mrk terhadap perbedaan kurang, tapi ada yang merespon di belakang. Kenapa si A bilang begini lalu si B bilang begitu? alah nggak usah dua dua. Ini karena lelah dengan kebingungan ya udah biar aja. Ada juga yg bilang: *'lon semayang yg lageh nyoe mantong hana pah, bek geupernoe yg laen le'*. (Bahasa Aceh, artinya: saya shalat yang seperti biasa aja belum sempurna, nggak usah diajarkan yang baru lagi).

Pemahaman baru dengan mesjid mesjid khusus juga menjadi fenomena baru di Banda Aceh. Mh, salah seorang pengurus MT Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa:

Di Banda Aceh ini ada kelompok yang ekstrim pemahamannya dan menilai orang di luar kelompoknya salah. Tetangga saya ada yang demikian, padahal silaturahmi kami bagus dan baik saja, tetapi jika kita datang ke mesjid tersebut, begitu kita pulang lalu tempat kita itu langsung disiram, seolah najis.<sup>22</sup>

Beragamnya konteks tantangan keberagaman di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar merupakan tantangan tersendiri. Sehingga meskipun berbagai resources terpusat di dua daerah ini, tetap saja sulit untuk berbuat banyak. Apa lagi, isu ini cenderung belum dipahami masyarakat secara lebih baik, atau dapat dikatakan masyarakat mengalami "keresahan yang buta". Buta maksudnya tidak memiliki informasi yang memadai, melainkan hanya merujuk apa yang disampaikan teungku. Karena informasinya terbatas, keresahan ini justru menjadi lebih kuat.

3. *Ketiga, isu yang bersumber dari pertentangan substansi pengajian antar teungku yang mengarah pada truth claim.*

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Mh, Pengurus MT di Banda Aceh, tanggal 7 Spetember 2019

Pada prinsipnya kondisi ini ada ditemukan di ketiga lokasi penelitian, hanya saja intensitas yang tinggi lebih tampak di Banda Aceh dan Aceh Besar. Beberapa narasumber dengan gamblang menyampaikan keresahannya terkait hal ini. Rt, anggota MPU Aceh Besar menyebutkan:

Contoh saya diundang ceramah di salah satu tempat yang ibu juga isi. Lalu muncul di kepala bagaimana cara supaya bisa diundang beberapa kali lagi. Maka mulailah menyalah nyalahkan ibu selaku saingan di tempat pengajian ini. Dengan suara tinggi dan marah Rt menambahkan: Ini penyakit. Tapi ini ada. Ini terjadi diantara penceramah. Lalu Rt menutup dengan keluhan berat dalam bahasa Aceh, '*nyan keuh, nyan yang hek ta pikei*' (Bahasa Aceh, artinya: nah inilah yang capek kita pikirkan).

Dari cara Rt menyampaikan hal ini, jelas terlihat sikap buruk beberapa penceramah ini telah menjadi bagian yang meresahkan Rt. Hal ini merupakan bibit munculnya *truth claim*, dengan tujuan mendulang pengakuan dari semakin banyak orang.

Penceramah di Aceh Besar Teungku Inong Rh, mengaku mengalami hal ini dalam beberapa bentuk situasi:

1. Pertama menurutnya, ada tengku pengajian di bale pengajian lain di desa yang sama dengannya menyatakan apa yang disampaikannyalah yang benar, yang lain salah. Sementara sebagian jama'ah yang menghadiri pengajiannya adalah juga jama'ah di tempat lain. Sehingga jama'ah menjadi bingung dan ada yang bertanya untuk konfirmasi ke Rh. Menurut Rh:

Dari segi pemahaman benar ada khilafiyah, tetapi khilafiyahnya bukan pada persoalan yang *qat'iy*. Kalau kemudian saling menjelekkkan ini karena ada kepentingan lain, yaitu agar masyarakat berbondong bondong membenarkan ia, dan menjatuhkan yang lain. Kalau saya tidak mau berbantah atau membalas. Apalah arti



berdebat dengan orang yang seperti itu. Karena Islam adalah agama yang santun.<sup>23</sup>

2. Pengalaman lain yang dialami Rh Menurutnya ada Teungku yang memberitahu kepada santrinya bahwa pengajian Rh adalah dari kelompok Wahabi, sehingga anak-anak tersebut mencemoohkan santri dayah Rh dengan ejekan wahabi.
3. Rh juga mengaku pernah terjadi tengku dari bale lain di gampongnya, bersama dengan perangkat gampong, membatalkan acara kaum ibu karena dianggap hal yang tidak terlalu penting. Rh berpendapat sikap yang merendahkan perempuan ini menjadi tantangan baginya karena ada tengku tengku gampong yang mendiskreditkan perempuan. Rh menambahkan:

“Kalau ada ceramah ibu-ibu yang beradu dengan kegiatan kaum Bapak, boleh di geser, sedih nggak kita?. Dianggap kegiatan kaum ibu kalau nggak adapun tidak masalah. Jangan kan di dukung mendapat perhatian pun tidak. Nah tengku tengku yang begini biasanya tengku tegku yang muda-muda. Teungku tengku yang muda ini nggak jelas pun alumni mana. Dia ngaji di Ulee Titi hari ini, besok dah ke tempat lain lagi, besok ke tempat lain lagi. Lalu sudah merasa berilmu. Dia tidak fokus dan menetap di salah satu dayah dengan serius mengaji kitab sampai detail. Kalau yang fokus tidak pulang-pulang di salah satu dayah, biasa disebut *Meudagang*. Kenapa disebut berdagang? Karena berdagang dengan Allah mengharap pahala lillahi ta’ala. Kalau tidak menetap, tidak dapat menyerap juga sepenuhnya bagaimana perilaku abu di malam hari, subuh, pagi dan siang. Tidak ada abu bertengkar atau merendahkan yang lain. Perempuan juga dimuliakan tidak ada direndahkan. Tapi teungku teungku muda ini justru berperilaku merendahkan perempuan.

Pengalaman Teungku Inong Rh ini menjadi catatan realitas interaksi diantara teungku-pengajian yang saling membenarkan atau saling meyalahkan. Situasi ini pastinya akan meresahkan jama’ah.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Rh, teungku inong dan pimpinan dayah yang menjadi penceramah di beberapa majelis ta’lim kaum ibu, 7 September 2019 di Aceh Besar

Pada tataran kedekatan jama'ah sudah sangat yakin dengan apa yang disampaikan teungku, lalu dianggap salah oleh jama'ah teungku yang lain, maka dapat menimbulkan disharmonisasi.

Hal senada juga terjadi di pengajian lain yang dialami Teungku Fw yang memberikan pengajian di lima MT di Aceh Besar. Mw selain mendatangi MT untuk menjadi penceramah, juga membuka pengajian di rumahnya untuk kaum Bapak pada malam tertentu. Selain itu di siang hari Mw ramai dikunjungi tamu yang ingin mendapatkan pengobatan dari berbagai penyakit. Banyak sekali yang datang ke sana hingga Mw sudah bisa membangun ruang khusus untuk tempat zikir pengobatan dan pengajiannya. Akan tetapi setahun lalu menurut Mw, beberapa pengajian tidak lagi mengaji dengannya, pengunjung yang berobat serta merta sepi. Awalnya Mw tidak tahu sebabnya, namun kemudian ia mengetahui bahwa ada fitnah yang dialamatkan untuknya bahwa dirinya *meu jen* (Bahasa Aceh, maksudnya: di tubuhnya ada jin. Ini berarti dia dianggap berteman dengan makhluk ghaib dan ilmunya ilmu hitam). Fitnah ini diketahuinya berasal dari Teungku lain, sebut saja Teungku T yang tidak menyukainya. Pengikut teungku T juga banyak yang tinggal di sekitar Tgk. Mw lalu turut mengembangkan hal ini sehingga beberapa kaum ibu yang terpengaruh mengusulkan kepada pengurus MT kaum ibu untuk mengganti Tgk Mw ini dengan teungku lain. Salah satu pengurus pengajian menurut Mw menyampaikan sikap, bahwa mereka tetap bertahan meski beberapa ibu ibu anggota pengajian sempat mengatakan kalau Mw yang masih menjadi teungku di pengajian tersebut, mereka akan keluar dari pengajian. Tapi peristiwa itu menurut Mw selesai dengan sendirinya ketika masyarakat lambat laun menyadari pandangan mereka yang salah, mengingat akhlak dan budi pekerti Fw yang terpuji. Sementara Teungku T justru terbuka beberapa aibnya oleh

pengikutnya sendiri. Disamping beberapa pengikutnya juga terlalu berlebihan menjelek jelekkan Tgk Mw, sehingga membuka kesadaran masyarakat tentang siapa yang benar.<sup>24</sup>

Salah seorang pengurus pengajian tempat Mw mengajar ngaji menjelaskan:

Biasalah bu, ini banyak yang iri hati karena teungku Mw tidak berhenti mengajar ngaji, khutbah Jum'at di mana mana, lalu yang berobat ke tempat beliau juga bermobil semua mewah mewah. Pastilah yang ada penyakit di hatinya, jadi iri bu. Apa lagi yang menginginkan beliau itu hancur, bagaimana caranya pasti akan dilakukan oleh mereka untuk membuat Mw hancur.<sup>25</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak F salah seorang tokoh masyarakat di sekitar tempat tinggal Mw. Menurutnya saat ini pasien teungku Mw berasal dari berbagai kabupaten. Tetapi para pengikut Teungku T, sampai sekarang masih menganggap Mw musuh, dan tetap berupaya menjelekkan Mw meski tidak lagi mempan untuk masyarakat sekitar sini. Bukan hanya Mw dimusuhi tetapi juga masyarakat yang dekat dengan Mw juga dianggap musuh. Pengajian ibu ibu yang masih konsisten dengan Mw juga dimusuhi oleh kelompok ini.<sup>26</sup>

Peristiwa yang hampir mirip juga dialami salah satu teungku, sebut saja Hd di Kota Banda Aceh. Kh, yang merupakan adik Hd menceritakan bahwa adiknya sampai menderita sakit selama tiga bulan karena sirik dengki pihak yang iri dengan nasibnya yang pada saat sebelum sakit, sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung yang ingin berzikir untuk kesembuhan penyakit mereka. Kh menyebutkan

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Mw, salah seorang Teungku Pengajian bagi kaum ibu di Aceh Besar. Wawancara dilakukan di Banda Aceh, pada 10 September 2019

<sup>25</sup> Wawancara dengan Sr, Pengurus pengajian di MT Aceh Besar. Wawancara dilakukan di Aceh Besar, 10 September 2019

<sup>26</sup> Wawancara dengan PF, tokoh masyarakat di salah satu desa di Aceh Besar. Wawancara dilakukan di Aceh Besar pada 11 September 2019

penyakit adiknya bukan medis, melainkan penyakit “kampong” atau penyakit sebagai akibat sirik dengki dengan menggunakan sihir. Banyak mobil mobil mewah parkir di tempat pengajiannya, menurut Kh menjadi sangat mencolok, dan mengusik kedengkiian pihak yang ada penyakit di hatinya. Kh sempat menyebutkan bahwa kasus adeknya ada kaitan dengan teungku lain di wilayah sekitar tempat tinggal adeknya.<sup>27</sup>

Gambaran dari pengalaman nara sumber di atas menunjukkan bahwa persaingan antar penyaji, baik secara substansi pengajian, maupun dari segi popularitas, telah pula berkontribusi menjadi isu disharmonisasi di tengah kelompok kaum ibu. Bahkan hal ini juga telah menjadi kegelisahan bagi penceramah yang peduli dengan situasi ini.

Demikianlah tiga isu disharmonisasi yang dialami oleh kelompok kaum ibu di Aceh. Ketiganya berdampak pada kualitas harmonisasi intra islam. Isu yang pertama terkait kedewasaan merespon perbedaan amalan yang bersumber dari PERTI, NU dan Muhammadiyah. Isu kedua terkait keresahan yang muncul sebagai respon spontan terhadap munculnya kelompok salafi/wahabi yang membawa konsep berbeda dari amalan yang mainstream di masyarakat. Isu disharmonisasi ketiga muncul sebagai akibat dari persaingan antar teungku pengajian, baik dari segi substansi, maupun dari segi popularitas.

### **C. Posisi Majelis Ta’lim Ditengah Konstelasi Disharmonisasi Kehidupan Beragama Intra Islam**

Ragam Isu-isu yang muncul ditengah-tengah masyarakat ikut menjadi perhatian dan perbincangan komunitas masyarakat. Suatu

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Kh, adik dari Tgk Hd, salah seorang penceramah di MT kaum ibu di Banda ACeh

isu yang muncul kepermukaan menyedot energi masyarakat jika isu tersebut dinilai mampu mengusik kenyamanan sehingga terjadi disharmoni kehidupan beragama intra Islam.

Komunitas masyarakat yang beragam adalah hal yang tidak mustahil, diantaranya terdiri dari komunitas politik kepentingan, komunitas idealis baik klasik maupun modern, dan lain-lain. Masing-masing komunitas tersebut memiliki kekhasan tersendiri dalam mensikapi.

Majelis Taklim adalah salah satu diantara komunitas masyarakat yang beranggotakan kaum ibu merupakan lembaga sosial keagamaan ikut berkontribusi terhadap ketahanan sosial masyarakat, ikut mengambil perhatian terhadap isu-isu keagamaan yang muncul dan berkembang di tengah-tengah umat Islam. Biasanya Isu-isu khilafiyah terhadap hal-hal furu'iyah adalah isu yang sering muncul dan bukan sesuatu hal yang baru bahkan telah ada sejak zaman Rasul.

Ada posisi dilematis yang dihadapi Majelis Taklim kaum ibu. Pada satu sisi Majelis Taklim Kaum ibu ini menjadi media penyebaran informasi yang bertolak belakang dengan pengajian lainnya yang sama sama disenangi oleh kaum ibu, sehingga tidak jarang mereka bingung harus merujuk yang mana. Namun disisi lain Majelis Taklim kaum ibu adalah kekuatan damai terbesar yang ada di Masyarakat Aceh.

Di Abdiya pada kewajiban fardhu kifayah di saat ada yang meninggal berbeda antara PERTI dan Muhammadiyah, tapi kelompok kaum ibu atas nama kegiatan sosial nasi duka selalu berhasil menjembatani situasi yang berbeda ini sehingga baik yang meninggal

dari keluarga besar PERTI atau Muhammadiyah, sama saja karena secara sosial organisasi kaum ibu ini memperlakukannya sama.

Sejauh ini meski secara regulasi pengembangan Majelis Taklim ini berada di bawah Kementerian Agama, namun dalam pakteknya umumnya Majelis Taklim ini memiliki kemandirian tanpa ada banyak dukungan eksternal. Sehingga kemandirian lembaga untuk independent menentukan apa yang akan dilakukan menjadi sangat terbuka. Tapi disisi lain ini jua menjadi situasi yang menunjukkan lemahnya control terhadap proses pembelajaran di tempat ini sehingga proses rekayasa pemahaman bisa saja terjadi oleh penceramah yang menyampaikan pengajaran.

Jika di Abdia organisasi Majelis Taklim kaum ibu berkembang dalam lingkup interaksi organisasi besarnya masing masing seperti Majlis Taklim Aisyiah, atau Majelis Taklim kaum ibu PERTI, di Banda Aceh dan Aceh Besar Pegajian kaum ibu sebagiannya berkembang mandiri dan sebagiannya menjadi dampingan lembaga atau dinas SyariatIslam.

Menjadi hal menarik untuk memetakan bagaimana posisi Majelis Taklim dalam mensikapi terhadap isu-isu keagamaan.

### **1. Sebagai Penyeimbang.**

Majelis Taklim menghormati isu-isu khilafiyah untuk menjaga ukhuwah, tidak perlu dipertentangkan, saling menyalahkan dan bersikap paling benar, khilafiyah mustahil dihilangkan bahkan menjadi rahmat. Perbedaan sangat mengikat dengan kontekstual, oleh karenanya saling menghormati dan menjaga silaturrahim sehingga tidak terjadi perpecahan intra umat Islam. apabila ada isu-isu yang muncul seperti salafi, wahabi, khilafah dan apabila tuduhan

ditujukan kepada kelompok tertentu, maka diselesaikan dalam pengajian bersama majlis taklim kaum bapak dan ibu dengan narasumber dalam profesi keilmuannya baik dari kalangan muhammadiyah maupun NU, sehingga secara keilmuan lebih terbuka.<sup>28</sup> Majelis Taklim yang penting mau menyampaikan walau satu ayat "*Ballighu 'anny walau aayah*" Terdapat juga kelompok-kelompok yang berbeda paham dalam pengajian Maklim Taklim akan tetapi tidak perlu dibantah artinya lebih mengambil sikap diam saja karena pada prinsipnya masing-masing sudah memiliki pengetahuan dan dasar rujukan masing-masing. Oleh karenanya tidak perlu memperkeruh suasana sesama komunitas intra Islam. Hal yang sama ini disampaikan oleh beberapa nara sumber.<sup>29</sup>

## 2. Sebagai Peredam.

Majelis Taklim sebagai sekolah cerdas masyarakat adalah subjek yang memiliki kekuatan menjaga keharmonisan sesama komunitas Majelis taklim khususnya dan masyarakat pada umumnya. Majelis Taklim menunjukkan sikap saling menghormati terhadap perbedaan pemahaman keagamaan dan cerdas dalam mensikapi isu-isu yang rentan memungkinkan merenggangkan silaturahmi dan mengeruhkan suasana atau terjadinya disharmonisasi. Diantaranya dengan mengambil sikap menghindari debat kelompok pro kontra. Melaksanakan pengajian rutin mingguan atau bulanan secara profesional menjadi diantara solusi sehingga mampu menghargai perbedaan dan menyelesaikan perbedaan dengan menemukan titik

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Zd, Pengurus aisyiyah Provinsi Aceh, 9 September 2019.

<sup>29</sup> Wawancara Rt, Pengurus MPU Provinsi Aceh, 7 september 2019. Mr. pengurus Aisyiyah Abdiya, 23 Juli 2019, dan Dh, Pengurus Muslimat NU Banda Aceh, 8 September 2019.

temu permasalahan.<sup>30</sup> Lebih baik menjaga yang kecil sudah mereka pahami dengan baik, jangan berikan banyak PR lagi kepada majelis pengajian dengan isu-isu yang menggoyang harmonisasi yang sudah lebih baik terpelihara, bahkan mereka mengatakan “kami mendengar tapi kami lupa”, akan tetapi apabila isu-isu yang disampaikan dengan “penjelasan yang benar”, maka mereka dapat menerima. *Khathibunnas ‘ala qadri ‘uqulihim*<sup>31</sup>.

Majelis Taklim ibu-ibu lebih potensial dalam pengajian keagamaan dari pada Majelis taklim kaum bapak-bapak. Abdiya masyarakatnya cenderung dengan Muhammadiyah, NU dan PERTI, memiliki keberagaman yang saling menghormati perbedaan, seperti mesjid digunakan bersama, pengajian-pengajian saling di isi dan dihadiri bersama oleh komunitas yang ada antara Muhammadiyah, NU, PERTI. Tidak saling menyalahkan, Isu-isu seputar ibadah antara lain, praktek ibadah shalat tarawih 8 dan 20 raka’at, kenduri kematian (nasi rantang kalau ada yang mushibah meninggal) yang diterima bersama di masyarakat, samadiyah (antara Muhammadiyah dan NU) dan lain-lain. Kecerdasan masyarakat dalam mensikapi perbedaan, menjadi peredam menajamnya perbedaan dan menutupi ruang terjadinya pecah belah komunitas masyarakat. Demikian pula terhadap isu salafi atau kelompok sunnah terjadi sedikit riak di masyarakat manakala sudah menyentuh hal-hal sensitif, seperti menggunakan sutrah shalat. Kecerdasan masyarakat yang telah mengakar baik dalam mensikapi, tidak membuka ruang perpecahan

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Zd, Pengurus Aisyiyah Provinsi Aceh, 9 September 2019.

<sup>31</sup> Wawancara dengan RI, Da’I Kota Banda Aceh, 8 September 2019.



dan lambat laun akan hilang dengan sendirinya.<sup>32</sup> Kondisi kondusif ini adalah merupakan wujud keharmonisan intra masyarakat Islam.

### **3. Pencair relasi diantara kelompok yang berbeda**

Selain Majelis Taklim yang di sk kan geuchik , secara pribadi juga hadir ditengah masyarakat, pengajian yang diinisiasi keluarga (wiritan pagujuban) misalnya majelis taklim gampong Meudang Ara juga memiliki keanggotaan yang terbuka untuk masyarakat, pengajian dilaksanakan juga secara bergilir dari rumah ke rumah peserta/anggota antar gampong, jama'ahnya berbaur tanpa skat inisial kelompok yang terikat dengan organisasi. Gampong yang mayoritas NU di dalamnya juga misalnya namun ada masyarakat kalangan Muhammadiyah, begitu cair meski dengan perbedaan praktek hal-hal furu' dalam keyakinan masing-masing. Sebagai contoh "ceramah-ceramah tabligh akbar misalnya di Abdiya bahkan ceramah di mesjid-mesjid dimanapun disini tak terkecuali (Muhammadiyah, NU, PERTI) dan Organisasi-organisasi masyarakat, demikian juga Aisyiah yang selalu ada kegiatan pengajian-pengajian, semuanya begitu membaaur. Contoh lain, pas puasa Ramadhan sering terjadi perbedaan antara NU dan Muhammadiyah tentang jatuhnya 1 ramadhan, maka di masyarakat yang berbeda rujukannya, tidak menjadi permasalahan, keluarga kami ikut penanggalan Muhammadiyah mulai ya keluarga kami saja, ga apa-apa biasa saja, demikian pula tentang shalat taraweh, shalat 11 rakaat dan 23 rakaat di mesjid atau di meunasah gampong2 biasa saja, masyarakat yang mau 11 rakaat mereka ke mesjid Taqwa Muhammadiyah terlepas dari komunitas organisasi keagamaan

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Roni Haldi, Kasie Bimas Islam, Kemenag Abdiya, 24 Juli 2019.

manapun. Saya selama menikah, suami saya NU sementara saya muhammadiyah, selama tinggal di gampong mayoritas NU, biasa saja misalnya “kalo puasa berbeda memulai puasa, sementara warga NU belum ya sudah, keluarga kami saja memulai, jadi ga masalah, kalo diajak suami jamaah tarawih mesjid NU biasa saja 23 rakaat boleh, 11 rakaat boleh. Contoh lain, selama menikah sering diajak ke mesjid yang 23 raka’at, ayo ga ada masalah, shalat ‘Idul Fithri misalnya shalat Idul Fithri ini kita shalat dimana?... di lapangan, ayo ..., nanti ‘Idul Adha di mesjid muhammadiyah, ayo juga ga ada masalah juga. demikian pula jika ke mesjid muhammadiyah, dulu suami saya kalo diajak ke mesjid muhammadiyah katanya “hana carong lon hana meurateb-rateb2, pakiban teuma hana meurateb-rateb, “nyan meurateb ngon hana meurateb kon sama saja yang penting ibadah, kita kasih pengertianlah kan, nyan eunteuk carong keudroe, akhirnya suami mau dan mengerti...”<sup>33</sup>

Berbeda dengan yang lain, Majelis Taklim Aisyiah lebih luas jangkauannya kegiatan pengajiannya, tidak hanya ta’lim ditempat pengajian seperti mesjid Taqwa, dan rumah-rumah anggota saja, bahkan ikut turun ke daerah-daerah seputar Abdiya dan gampong-gampong pedalaman, antara lain manggeng, sangkalan, babah rot dan lain-lain. Majelis Taklim Aisyiah juga melakukan penyuluhan terhadap kasus-kasus di masyarakat seperti inses, kenakalan remaja, kejahatan seksual. Terhadap isu disharmonisasi, justeru tidak harus menyita energy ada, masyarakat Abdiya membaur, harmonis. Sebagai contoh, hadirnya kelompok salafi, tidak mendapat sambutan

---

<sup>33</sup>Wawancara dengan Ro, Pengurus MAA dan Da’iyah di Abdiya, dan Ra, Pegiat pemberdayaan perempuan di Abdiya, mantan pengurus NA cabang Blang Pidie, 24 september 2019.

masyarakat, sehingga lambat laun terkesan hilang, atau mungkin saja tiarap.<sup>34</sup> Hal yang sama juga disampaikan oleh tokoh ulama Abdiya.

Pengajian muhammadiyah juga banyak pengikut PERTI dan pengikut NU yang ikut. Saling menghormati, menghargai. Pengikut PERTI tidak punya mesjid tersendiri, sementara Muhammadiyah punya mesjid tersendiri dengan nama mesjid Taqwa. Pengelolaan Mesjid pemerintah di Abdiya justeru dikelola secara bersama diantara Muhammadiyah, PERTI dan NU. Pengajian juga beragam dan bervariasi “Apabila ada yang berbeda jangan kita tantang dengan amarah, kalo mereka memahami manfaatnya lebih baik, melihat sikap kita baik tentu orang mau ikut. Contohnya kenduri kematian, antaran nasi rantang yang meringankan keluarga yang sedang berduka, baik kepada keluarga kaya terlebih keluarga miskin. Akhirnya antar rantang menjadi kebiasaan masyarakat dan mendapat sambutan baik masyarakat. Demikian pula kegiatan manasik haji, pesertanya beragam yang ikut semua, orang-orang PERTI ikut, bahkan mesjidnya (gampong pengikut Perti) dipakai tidak ada masalah, ceramah-ceramah disesuaikan, pemateri dan materi bervariasi, misalnya nyoe tameuhadap ngon awak muhammadiyah lagenyoe ceramah tanyoe, nyoe tajak keudeh bak awak PERTI lagenyoe tapeugah teuma, menyesuaikan, kalo saya kata begini, begini, hana dipajoeh cit bak awaknyoe, hana manfaat cit”.<sup>35</sup> ini artinya sikap bijak, sangat mencair dan memperhatikan audiens/peserta majelis pengajian terhadap ketepatan materi yang disampaikan, agar pesan- pesan tidak menjadi sia-sia atau tidak bermanfaat.

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Tgk H. Abdurrahman Badar, Ulama dan Mantan ketua MPU Abdiya, 24 September 2019.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Mr, Pengurus Aisyiah Abdiya, 23 Juli 2019

#### 4. Benteng terhadap Isu-Isu disharmonisasi

Majelis Taklim penting sebagai benteng agar ibu-ibu pengajian jangan cepat terpengaruh terhadap isu-isu, untuk menjaga keharmonisan hidup keber-agamaan dimasyarakat menjadi terjaga lebih baik. Majelis taklim menjadi benteng di masyarakat. Beberapa pandangan MPU misalnya terhadap isu salafi, isu itu baru-baru ini saja (jamaahnya biasanya banyak ibu-ibu yang datang hadir bersahaja dari luar Abdiya seperti Nagan Raya, Meulaboh, Tapak Tuan), mereka sangat mudah membid'ahkan orang. Mereka adalah masyarakat biasa, namun punya ciri khas tersendiri yaitu jenggot, celana pendek/jingkrak. Gampong Geulumpang Payong kecamatan Blang Pidie dan kecamatan Susoh misalnya mereka memiliki jamaah tersendiri, dalam hal aqidah ada yang berbeda sedikit dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat.<sup>36</sup>

Abdiya memiliki beberapa kelompok organisasi keagamaan yaitu PERTI, Muhammadiyah, NU , kini bertambah satu lagi kelompok zikir Abu Imran Wali. Kelompok zikir kekhasannya memiliki majlis zikir dan taklim (tasawuf, Tauhid), dalam pandangan MPU pembelajarannya tidak sesuai untuk kalangan masyarakat awam akan tetapi lebih tepat bagi mereka yang sudah memiliki dasar keilmuan tersebut. "untuk awam kon hana di tuoh".<sup>37</sup>

Untuk menghindari gesekan isu-isu di masyarakat, diketahui bahwa di Abdiya ada organisasi keagamaan PERTI, NU, dan Muhammadiyah. PERTI, NU sama-sama beraqidah ahlu sunnah

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Tgk H. Abdurrahman Badar, Ulama dan Mantan ketua MPU Abdiya, 24 September 2019.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Tgk H. Abdurrahman Badar Ulama dan Tgk M Dahlan ketua MPU Abdiya, 24 September 2019.

waljama'ah, mereka memiliki ciri khas, PERTI banyak yang lama (pandangan fikih furuiyah) dipertahan, barang yang baru (fikih pembaruan) dilihat/kaji dulu, NU caranya yang lama dilaksanakan, pergunakan dan yang barupun diterima. Muhammdiyah asai yang baroe itu benar dan tepat diterimong. Untuk kasus musibah meninggal, PERTI doa saja hana ceuramah, muhammadiyah ceuramah mantong, namun seperti di susoh misalnya (gampong PERTI) apabila jamaah takziah secara bersama berfariasi maka ceramah ada, doa juga ada, meskipun muhammdiyah berkeyakinan cukup hanya ceuramah saja dilaksanakan, contoh lain adalah kenduri rantang antaran untuk meringankan keluarga mushibah kematian praktek sebagaimana muhammdiyah juga diterima baik oleh masyarakat NU dan PERTI, meskipun masih ada yang kenduri keluarga mushibah secara pribadi. Artinya hal yang demikian agak longgar dan menyesuaikan, untuk menghindari gesekan-gesekan perbedaan di masyarakat.<sup>38</sup>

MPU, terhadap isu-isu disharmonisasi mengambil sikap berusaha menghimbau stakeholder dan tokoh-tokoh agama, tengku-tengku supaya pengajian-pengajian yang disampaikan tentang aqidah supaya yang benar, karena diharapkan majelis taklim menjadi benteng di masyarakat. MPU juga melakukan monitoring khusus terhadap situasi pergerakan isu-isu dan menyampaikan kemasyarakat agar tidak terpengaruh dengan "isu-isu". MPU lebih selektif setiap ada laporan masyarakat, "MPU selidiki terlebih dahulu setiap na laporan masyarakat, di gampong pulan misalnya na aliran yang agak aneh bacut, dikamo tanyong dilee bak tukang lapor, "puenan jih kelompok nyan, pakiban cara aqidah jih, soe pimpinan

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Tgk H. Abdurrahman Badar, Ulama dan Mantan ketua MPU Abdiya, Tgk M Dahlan, Ketua MPU Abdiya, 24 September 2019.

jih, kalo teukedi hana pah kamo hei pimpinannya, contoh lain laporan tentang salah satu organisasi gerakan (HTI) pada masa itu yang sedang hangat, kamoe hei, oh ban kamo tanyong jawabannya kamo kon bidangnyan, bidang laen, kamo punya induk(pusat) di salah satu kota. Pergerakan ini disadari dan mereka sadar bahwa dipantau dan diawasi pergerakan terhadap isu-isu". Artinya MPU aktif melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap isu-isu yang dinilai mengusik kenyamanan keber-agamaan masyarakat khusus di wilayahnya, Aceh pada umumnya. Hal yang senada juga disampaikan oleh tokoh lainnya.<sup>39</sup>

## **5. Mediator yang Memperbesar Konflik Antar Tengku.**

Majelis Taklim yang diharapkan berkembang wawasan yang lebih luas akan tetapi masih ada anggota pengajian yang menerima apa saja yang disampaikan dalam pengajian, semuanya diterima "*sami'na wa atha'na, atau sami'na wa nashina*" pasif dan tidak aktif interaksi dalam pembelajaran antara tengku dan peserta majelis pengajian, kalao ada perbedaan-perbedaan lebih mengambil langkah diam, khilafiah jika kita mengajak dialog mereka tidak ada bahan. Pengurus biasanya memiliki pengetahuan lebih dari pada yang lain. Namun gejala di masyarakat tidak demikian, yang penting mau mengurus pengajian. Keadaan ini memungkinkan terpicu konflik karena terkesan masih sangat terbatas rujukan dan kurang berupaya membuka, membaca ragam kitab/buku, keilmuan, pembahasan keagamaan yang terus berkembang. Akibatnya apa yang sudah diterima dalam pengajian menganggap itulah yang paling benar. Hal ini menjadi dilema, karena dapat memunculkan konflik antara

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Dh, Pengurus muslimat NU Provinsi Aceh, dan Zd, Pengurus Aisyiyah Provinsi Aceh, Rt, anggota MPU Provinsi Aceh, di Banda Aceh, Tgk M Dahlan, Ketua MPU Abdiya di Abdiya.

pemateri/tengku-tengku baik antara tengku salafi, tradisional, dengan tengku-tengku atau ulama modern dan progresif, yang terus berkembang sesuai konteks zaman/ realitas kekinian dalam penyampaian materi. Pengajian yang menjamur dimana-mana tidak mustahil pula banyaknya tengku dan varian materi yang beragam. Majelis taklim yang menetapkan pilihan tengku pengajiannya yang tidak bervariasi dan keterbukaan wacana dalam membelajarkan anggota pengajiannya sangat mungkin terbuka peluang konflik antar tengku disebabkan keterbukaannya terhadap berbagai pendapat ulama baik klasik dan modern menjadi tidak tersentuh dan tidak tersampaikan secara baik dan terbuka. Kultus tengku dan mazhab menjadi rentan antar jamaah pengajian Majelis taklim. Kini dunia maya juga tersedia ceramah-ceramah agama yang menyajikan banyak penceramah. Pilihan pendengar terhadap penceramah favorit juga beragam. salah seorang pengurus Majelis taklim sempat berucap "ustazah, nanti materinya tentang fikih ya, o jadi fikihnya memang ada lain, fikih itu berkesinambungan, mulai dari thaharah sd zakat puasa haji, muamalah, munakahat dan lain lain. O gitu ya, saya ga tau, saya maunya tentang zakat saja ...disisi lain mengandalkan semua yang ada di internet, dan TV. Kenapa di TV begini dan di internet lain lagi. Misalnya masuk di whatsapp nya peserta majlis taklim tentang bacaan niat puasa ramadhan .. baris *fathah* kata *ramadhana* menjadi dipertentangkan karena pendengaran lisan yang berbeda dengan whatsapp dimedia audio visual. Jawaban ustazah; Ibu ga usah pintar-pintar kalilah ya, coba lihat al-Quran *Syahrul ramadhana*. Hal-hal seperti ini yang tidak prinsip sering terjadi, ada yang merasa benar ilmunya yang didapat bukan karena berguru ..."<sup>40</sup> kondisi ini menjadi salah satu contoh sebagai mediator yang

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan RI, Da'I Kota Banda Aceh, 8 September 2019.

membuka konflik antara tengku/ustaz/ah pengajian oleh majelis taklim yang sebenarnya tidak diharapkan.

#### **D. Peluang dan Tantangan Penguatan Peran Majelis Ta'lim dalam Harmonisasi Kehidupan Beragama Intra Islam di Aceh**

Dari penjelasan sub terdahulu, sangat disadari bahwa ternyata kaum ibu terpapar cukup besar terkait isu disharmonisasi. Majelis ta'lim selaku satu satu sekolah tempat kaum ibu menuntut ilmu juga tidak terlepas dari situasi yang dapat memperbesar disharmonisasi intra Islam. Sehingga menjadi satu kebutuhan untuk mensegerakan melakukan penguatan terhadap majelis ta'lim ini. Apa lagi peluang yang tersedia cukup besar untuk dimaksimalkan dalam menghadapi tantangan yang ada. Untuk memperjelas pembahasan ini akan diuraikan dalam sub peluang, sub tantangan dalam penguatan peran MT perlu mendapat penguatan.

##### *1. Peluang Penguatan Peran Majelis Ta'lim*

Peluang yang dimaksudkan adalah meliputi kekuatan internal dan kesempatan eksternal yang dapat dimaksimalkan untuk penguatan MT. Ada beberapa kekuatan yang dikemukakan oleh narasumber penelitian terkait MT. Kekuatan pertama adalah semangat yang tinggi dari kelompok kaum ibu untuk mengikuti berbagai pengajian. Hal ini disampaikan oleh Ketua MPU Abdya yang menyebutkan bahwa yang paling banyak menghadiri pengajian biasanya kaum ibu. Teungku Inong Rh di Aceh Besar juga menyebutkan bahwa kaum ibu banyak yang menyukai hadir di berbagai pengajian, sehingga mereka memiliki jadwal sendiri dengan tempat pengajian berbeda, beda di setiap harinya.<sup>41</sup> Kekuatan kedua

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Ketua MPU Abdya di Blang Pidie; dan wawancara dengan Teungku Inong Rh di Aceh Besar



adalah kemandirian majelis ta'lim sebagai organisasi *grass root*. Rh menyebutkan:

Majelis ta'lim ini betul betul tahan banting. Tidak ada dana bantuan apapun dia bisa bertahan dengan pengajian rutinnnya baik mingguan maupun bulanan. Beragam kegiatan juga rutin di jalankan dengan atau tidak ada dukungan. Ada budaya urunan yang terbangun dalam aktifitas keorganisasian majelis ta'lim. Dari mulai kebutuhan konsumsi jika diperlukan, hingga biaya untuk teungku yang diundang.<sup>42</sup>

Di Abdya juga kekuatan ini sangat disadari oleh tokoh dakwah. Ro yang merupakan da'iyah dari kalangan Muhammadiyah menyebutkan:

Karena budaya kemandirian MT sudah terbangun kuat, jadi kita hidupkan MT dimanapun jadi tidak sulit. Saya selain di Aisyiah, juga membuat MT di keluarga keluarga saya. Jadi setiap satu bulan sekali kami ada pengajian, saya yang rutin isi. Kami kumpul uang bersama untuk kegiatan arisan keluarga, dan selalu mengisinya dengan siraman rohani. Sehingga acara keluarga kami terasa lebih berkah.<sup>43</sup>

Dua kekuatan ini merupakan resources yang penting dan potensial bagi penguatan peran MT dalam membangun harmonisasi kehidupan beragama intra Islam. Kekuatan ini pulalah yang bila dimaksimalkan untuk mendapatkan peluang yang ada, maka berkontribusi bagi penguatan MT.

Ada beberapa peluang sebagai kekuatan eksternal yang dapat dimaksimalkan. Peluang pertama adalah keberadaan MT yang langsung berada di bawah pembinaan Kementerian Agama secara langsung. Kasie penais Kemenag Abdya menyebutkan:

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Rh, teungku inong dan pimpinan dayah yang menjadi penceramah di beberapa majelis ta'lim kaum ibu, 7 September 2019 di Aceh Besar

<sup>43</sup> Wawancara dengan Ro, Pengurus MAA sekaligus daiyah di Abdya, wawancara dilakukan di Blang Pidie, pada 25 Juli 2019.

Kalau di Abdya pembinaan MT ini inherent dengan tugas di bawah KUA. Pada KUA ada penyuluh fungsional PNS lima org empat laki laki dan satu perempuan yang ditempatkan di Blang Pidie, Susoh, Kuala Bate, Manggeng, dan Tangan-Tangan. Tiga tahun lalu sudah direkrut penyuluh non PNS yang setiap kecamatan terdiri dari delapan orang. Mereka tunduknya di KUA. Dari delapan delapan org dibagi tupoksi: bagian zakat, wakaf, keluarga sakinah, kerukunan umat beragama dan aliran sempalan. Rata rata mereka sarjana non kependidikan yang memang berprofesi sebagai guru guru di MT atau TPA, serta wirid yasin. Jadi pembinaan MT ini bisa masuk melalui bidang keluarga sakinah ataupun kerukunan umat beragama.<sup>44</sup>

Kebijakan yang berlaku di Abdya secara umum juga berlaku di kabupaten lain. Di Aceh Besar, pengurusan SK pengurus Majelis Ta'lim difasilitasi juga oleh penyuluh di KUA. Secara kebijakan nasional kemenag juga telah semakin konsern dengan keberadaan MT ini. Dalam "Regulasi Majelis Taklim; Pedoman Pembinaan Majelis Taklim" (Depag RI: 2009), setidaknya ada sembilan fungsi dan peran Majelis Taklim yang dapat dikembangkan: *Pertama*, memperkuat fungsi Majelis Taklim sebagai tempat pengajaran agama Islam secara luas, yang meliputi pengkajian tentang pokok-pokok ajaran Islam dan kaitannya dengan persoalan sehari-hari yang dihadapi oleh umat Islam itu sendiri. *Kedua*, meningkatkan fungsi Majelis Taklim dari tempat penyelenggaraan pengajian menjadi wahana melakukan kaderisasi umat Islam. Kaderisasi adalah suatu sistem menyiapkan generasi yang akan datang. *Ketiga*, mengembangkan fungsi konseling. Sebagai salah satu lembaga pendidikan non formal, Majelis Taklim bertanggung jawab untuk mendidik dan membantu jamaahnya untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat serta mampu memecahkan berbagai

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Rony Hadi, Kasie Penais kemenag Abdya di Blang Pidie, pada 24 Juli 2019

persoalan hidup yang dihadapi. *Keempat*, menjadikan Majelis Taklim sebagai pusat pengembangan keterampilan atau skill jamaah. Setiap muslim idealnya mampu berperan ganda dalam kehidupannya, yaitu sebagai 'abid (penyembah Allah) dan sekaligus sebagai *khalifah fil ardh* (orang yang memakmurkan bumi). *Kelima*, meningkatkan peran pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi dan sosial. Majelis Taklim bisa menjadi media sosial dalam mengkomunikasikan upaya-upaya pembangunan umat, baik secara lahir maupun batin. *Keenam*, menjadikan Majelis Taklim sebagai wadah silaturahmi dan rekreasi ruhani. *Ketujuh*, mengembangkan fungsi sebagai pusat komunikasi dan informasi. *Kedelapan*, mengembangkan peran sebagai tempat berkembangnya budaya Islam. *Kesembilan*, menjadikan Majelis Taklim sebagai lembaga kontrol sosial (social control). Dengan fungsi control ini, eksistensi Majelis Taklim akan semakin diperlukan di tengah-tengah masyarakat.

Kesembilan fungsi yang diatur pada kebijakan kemenag di atas selama ini belum berfungsi merata karena tidak ada tekanan yang mewajibkan pembinaan sehingga MT dapat menjalankan fungsinya sebagai mana yang diharapkan. Namun saat ini Kemenag semakin menunjukkan keseriusannya, dan sedang menyusun regulasi majelis taklim. Menurut Direktur Penerangan Agama Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, *A Juraidi*, regulasi tersebut disusun bukan untuk mengatur-atur majelis-majelis taklim dan membatasinya, tapi untuk memberikan penguatan terhadap majelis-majelis taklim. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam), Muhammadiyah Amin, mengatakan,

majelis taklim memiliki peran penting dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat Islam di Tanah Air.<sup>45</sup>

Jika regulasi ini telah berjalan, maka eksistensi MT semakin jelas dan semakin diperhitungkan. Dimana MT dapat mendaftarkan diri sebagai lembaga pendidikan di masyarakat melalui KUA, dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Peluang lainnya adalah keberpihakan banyak resources, baik individu maupun lembaga yang siap untuk melakukan pembinaan secara sukarela terhadap penguatan Majelis Ta'lim. MT kerap menjadi media untuk aktualisasi banyak pihak. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Rony Kasie Penais Kemenag Abdya, ketika ia memiliki amanah dari organisasi Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT), untuk mengembangkan kegiatan Tahsin Al-Qur'an, maka ia menengmbangkannya di beberapa MT di Abdya ini. Selain itu beberapa perusahaan juga mengalokasinya dana CSRnya melalui kegiatan di MT. Lembaga perguruan tinggi seperti Pusat Studi Wanita (PSW) UIN AR-Raniry juga telah empat tahun melakukan penguatan managemen MT dengan tujuan memperkuat eksistensinya sebagai satu satunya sekolah bagi kaum ibu di masyarakat Aceh.

Peluang lain adalah komitmen politik yang kerap memusatkan perhatiannya pada pembinaan MT. Di Abdya di Dinas Syariat Islam ada alokasi pembinaan MT, dengan implementasinya berupa kegiatan gabungan pengajian MT dari kecamatan kecamatan. Kegiatan ini dikelola oleh Ibu Bupati Abdya (Ketua PKK Kab

---

<sup>45</sup> Diakses pada 19 Oktober 2019 dari <https://printsatumedial.wordpress.com/2019/07/25/kemenag-susun-regulasi-majelis-taklim/>

Abdya).<sup>46</sup> Sementara untuk wilayah Kota Banda Aceh, Baitul Mal kota Banda Aceh pernah mengalokasikan dana untuk kegiatan MT yang aktif sejumlah Rp.3.000.000 pertahunnya. Sehingga dengan dana ini MT dapat mengembangkan beragam kegiatan yang dibutuhkan oleh anggotanya.<sup>47</sup> Intinya MT memiliki peluang yang luas untuk diperkuat sebagai lembaga yang membangun harmonisasi intra Islam. Terlebih hal ini terkait dengan fungsi yang dikembangkan penyuluh Kemenag yaitu kerukunan hidup beragama.

## 2. *Tantangan Penguatan Peran Majelis Ta'lim*

Tantangan terbesar bagi MT adalah karena masih ditempatkannya MT sebagai sasaran atau objek pembangunan bukan subjek pembangunan. Sehingga MT kerap menjadi sasar sosialisasi, ceramah, nasehat, tempat pengajian dan lainnya yang menempatkan MT sebagai pendengar atau peserta yang cenderung pasif. Hal ini juga diakui oleh beberapa narasumber, yang memang belum melihat potensi MT sebagai subjek yang mampu menjadi mitra pembangunan khususnya dalam membangun harmonisasi kehidupan umat intra Islam. Hal ini diakui oleh Narasumber Kemenag Abdya ketika ditanya tentang peran dan kiprah MT di masyarakat, diakui bahwa MT kaum ibu sangat berperan di masyarakat. Tetapi ketika ditanyakan apakah tipikal pembangunan terkait MT sudah menempatkan MT sebagai subjek pembangunan. Diakui dengan terbuka bahwa sebelumnya memang hal ini belum terfikir, tapi narasumber setuju ini penting dan kedepan akan dipertimbangkan.

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Ubaidillah, S.Ag, MA, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya, Wawancara dilakukan di Blang Pidie pada 24 Juli 2019

<sup>47</sup> FGD dengan pengurus MT dari Banda Aceh dan Aceh Besar pada 2 Agustus 2019 di Banda Aceh

Tantangan lainnya adalah belum ada satu dinas manapun yang secara jelas menempatkan pemberdayaan MT sebagai salah satu tupoksinya. Meski Pedoman Pembinaan MT dikeluarkan oleh Kementerian agama, akan tetapi Kemenag sendiri belum pernah punya program yang khusus dan berkelanjutan untuk pembinaan MT. Yang tersedia pembinaan MT dihubungkan dengan penyuluh di KUA yang anggap penyuluh KUA akan beri ceramah ke MT yang ada di wilayah kerjanya. Tetapi ketika ditanya pemberdayaan khusus untuk MT dalam pembangunan yang dijalankan, jawabnya tidak ada. MPU Abdy juga menjawab sama bahwa kalau langsung ke MT tidak ada, tapi anggota MPU rata rata mengelola pengajian. Hal ini juga disampaikan oleh Rt, MPU provinsi yang menyebutkan pernah mengusulkan pembinaan yang sistematis untuk MT melalui program MPU, tapi kemudian disebutkan bahwa aktifitas anggota MPU yang berceramah ke banyak majelis ta'lim dianggap eks oppsio sebagai kegiatan MPU juga jadi nggak ada program khusus. Kepala Dinas Syariat Islam Abdy menyebutkan punya program terkait majelis ta'lim, tapi bukan spesifik penguatan MT di masyarakat. Melainkan kegiatan ta'lim akbar MT MT di Abdy mewakili kecamatan kecamatan. Kegiatan ini menurutnya dikelola oleh Ibu Bupati atau ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Barat Daya.<sup>48</sup>

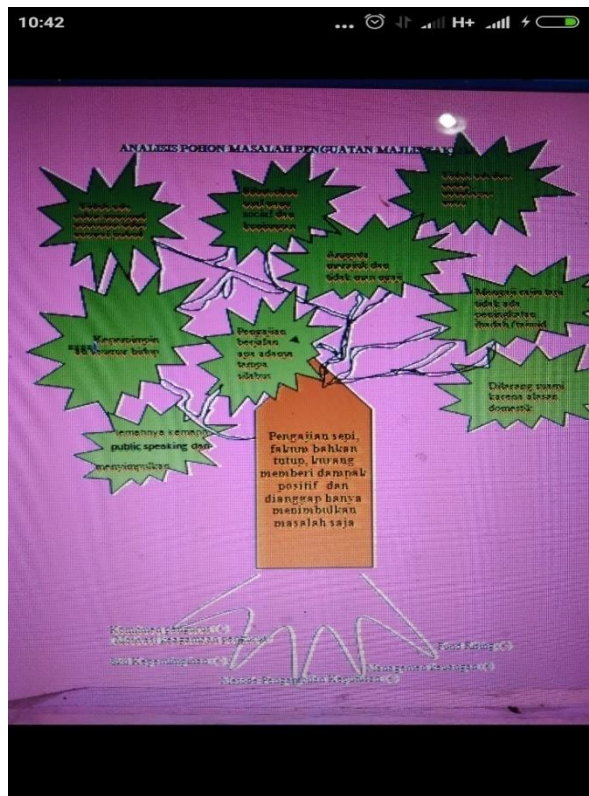
MT juga pada sebagian desa kurang mendapatkan penghargaan, apa lagi pengakuan, sehingga ada kasus kegiatan MT yang harus dibatalkan karena beradu dengan rapat atau kegiatan lainnya. Hal ini disampaikan Rh di Aceh Besar. Menurut Rh sebagian perangkat gampong masih ada yang berfikir bahwa jika tidak ada MT juga tidak menjadi persoalan. Selain itu menurut Rh komitmen dukungan untuk MT juga sangat terbatas. Sebagai perbandingan menurutnya

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Kadis Syariat Islam Aceh Barat Daya Ubaidillah di Blang Pidie pada 24 Juli 2019

untuk kegiatan sepak bola, dengan mudah desa mengucurkan dana Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), akan tetapi untuk MT pernah ada bantuan kegiatan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), itupun dengan proses yang sulit untuk memohonnya. Menurut Rh, sepertinya hampir hampir tidak ada dukungan desa ini.

Tantangan lainnya adalah terkait internal MT yang masih lemah dalam segi management organisasi, sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran internal yang berbuntut pada melemahnya MT bahkan ada yang sampai berhenti beraktifitas (FGD MT Aceh Besar dan B. Aceh). Berikut merupakan gambar pohon masalah yang dipetakan ketika FGD dengan MT di Banda Aceh dan Aceh Besar.



Akar dari masalah

masalah yang muncul yang dihadapi oleh majelis ta'lim adalah :

- a. Lemahnya Komitmen pengurus untuk secara seiris dan bersungguh sungguh dan serius mengelola majelis.
- b. Lemahnya motivasi keagamaan pengurus MT untuk berkorban waktu dan tenaga mengurus MT sebagai

- c. Kemampuan Fund Raising yang lemah sehingga kesulitan membayar teungku menjadi masalah bagi sebagian MT
- d. Skill Kepemimpinan pengurus MT yang lemah sehingga proses memimpin rapat atau mengomandoi kerja kerja MT terkadang tidak dipimpin.
- e. Manajemen keuangan yang juga lemah sering menimbulkan masalah pertengkaran karena kecurigaan dan ketidakpercayaan anggota pada pengurus.
- f. Lemahnya pada kemampuan Pengambilan Keputusan sering juga menimbulkan konflik karena ada beberapa keputusan yang diambil spontan tanpa musyawarah, lalu mendulang protes dari yang lain.

Keenam hal inilah yang menjadi tantangan internal untuk penguatan MT dalam membangun harmonisasi kehidupan beragama intra Islam di Aceh.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai kesimpulan adalah;

1. Terdapat tiga isu mendasar yang dialami kelompok perempuan terkait disharmonisasi. Isu yang pertama terkait kedewasaan merespon perbedaan amalan yang bersumber dari PERTI, NU dan Muhammadiyah. Isu kedua terkait keresahan yang muncul sebagai respon spontan terhadap munculnya kelompok salafi/wahabi yang membawa konsep berbeda dari amalan yang mainstream di masyarakat. Isu disharmonisasi ketiga muncul sebagai akibat dari persaingan antar teungku pengajian, baik dari segi substansi, maupun dari segi popularitas.
2. Posisi majelis ta'lim kelompok perempuan dalam konstelasi harmonisasi kehidupan beragama intra Islam di Aceh ada lima. Pertama MT berposisi sebagai penyeimbang dengan keyakinan dikalangan MT bahwa perbedaan adalah rahmat dan tidak perlu menjadi masalah. Kedua, MT di posisi sebagai peredam dimana berbagai materi pengajian kerap menjadi peredam yang tidak memperuncing perbedaan antara ragam amalan ibadah yang berbeda. Ketiga, pencair relasi diantara kelompok yang berbeda melalui kegiatan beragam majelis ta'lim. Sehingga kegiatan bersama lintas organisasi ini menyebabkan relasi masing masing kelompok berbeda terbangun positif melalui interaksi yang membuat masing masing pihak bisa lebih dekat. Keempat, MT menjadi benteng terhadap isu-isu disharmonisasi. Dalam posisi ini MT menjadi media yang memperkuat ketahanan masyarakat untuk tidak terpancing pada isu-isu yang memecah belah atas nama perbedaan pemahaman intra Islam. Kelima, mediator yang memperbesar konflik antar tengku. Selain posisi positif, salah satu

posisi MT juga ternyata dapat memperbesar konflik yang terjadi antar teungku karena keberpihakan MT pada salah satu teungku dan ikut membenarkan dan melemahkan teungku lainnya.

3. Peluang penguatan peran majelis ta'lim dalam harmonisasi kehidupan beragama intra Islam di Aceh ada empat. Pertama, peluang secara internal adalah semangat yang tinggi dari kelompok kaum ibu untuk mengikuti berbagai pengajian. Kedua, peluang internal lainnya adalah kemandirian majelis ta'lim sebagai organisasi gress root. Ketiga, peluang eksternal dimana secara kebijakan keberadaan MT yang langsung berada di bawah pembinaan Kementerian Agama. Keempat, peluang lainnya adalah keberpihakan banyak resources, baik individu maupun lembaga yang siap untuk melakukan pembinaan secara sukarela terhadap penguatan Majelis Ta'lim. Peluang kelima adalah komitmen politik yang kerap memusatkan perhatiannya pada pembinaan MT.
4. Tantangan Penguatan Peran Majelis Ta'lim ada empat. Tantangan pertama adalah karena masih ditematkannya MT sebagai sasaran atau objek pembangunan bukan subjek pembangunan. narasumber setuju ini penting dan kedepan akan dipertimbangkan. Tantangan kedua adalah belum ada satu dinas manapun yang secara jelas menempatkan pemberdayaan MT sebagai salah satu tupoksinya. Meski Pedoman Pembinaan MT dikeluarkan oleh Kementerian agama, akan tetapi Kemenag sendiri belum pernah punya program yang khusus dan berkelanjutan untuk pembinaan MT. Tantangan ketiga adalah MT pada sebagian desa kurang mendapatkan penghargaan juga dukungan. Tantangan keempat adalah terkait internal MT yang masih lemah dalam segi management organisasi, sehingga tidak

jarang terjadi pertengkaran internal yang berbuntut pada melemahnya MT bahkan ada yang sampai berhenti beraktifitas.

## **B. Saran Saran**

Sebagai saran yang dirumuskan dari hasil penelitian adalah:

1. Mengingat isu disharmonisasi juga cukup kuat dialami oleh kelompok perempuan di masyarakat, maka perlu diupayakan secara konsisten penguatan peran MT sebagai penyeimbang, peredam, dan benteng dari isu disharmonisasi.
2. Kepada Kemenag baik provinsi di kabupaten, dan provinsi diharapkan mengembangkan program khusus untuk pembinaan Majelis Ta'lim.
3. Kepada para pihak yang terkait dengan pembangunan yang terkait dengan MT diharapkan mengembangkan paradigma pembangunan yang memposisikan MT sebagai subjek pembangunan, bukan semata objek, dimana MT hanya menjadi sasaran sosialisasi atau sasaran pengajian.
4. Mengingat MT merupakan satu satunya lembaga pendidikan di masyarakat yang mencerdaskan kaum ibu, namun masih terkendala dalam kapasitas pengelolaannya sebagai organisasi gress root, maka sangat diharapkan stake holder terkait melakukan penguatan keterampilan pengelolaan MT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qodir, *Agama Kekerasan*, (Yogyakarta: Primasophi, 2003)
- Analiansyah, *PAR Berbasis Majelis Ta'lim di Kajhu Aceh Besar, Hasil Penelitian*, 2015
- Asep Gunawan (ed.), *Artikulasi Islam Kultural: Dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004).
- Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*, (Jakarta:Paramadina, 1999).
- \_\_\_\_\_, 2001, **Belum Ada Negara Sebagai Acuan Pelaksanaan Syariat Islam**, Tempo Interaktif, 11 Januari
- Badri Yatim, *Soekarno; Islam dan Nasionalisme*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998).
- \_\_\_\_\_, Ed, 1998, *Radikalisme Agama*, Jakarta PPIM-IAIN
- Diamond, Malcolm L, 1974, *Contemporary Philosophy and Religious Thought*, New York, McGraw-Hill Book Company
- Endang Turmudi dan Riza Sihbudi (ed.), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2005).
- Fachry Ali, *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan; keharusan demokratisasi dalam islam Indonesia*,(Surabaya: Risalah Gusti, 1996)
- George Ritzer dan Douglas J Goddman, *Modern Sociological Theory*, Singapore: The Mc.GrawHill Companies, 1990, p.160-164

- Hendro Prasetyo, Ali Munhanif, dkk, *Islam dan Civil Society: Pandangan Muslim Indonesia*, (Jakarta: Gramedia bekerjasama dengan PPIM-IAIN Jakarta, 2002).
- Jamhari (ed), 2004, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta, Garfindo Persada
- Kallen, Horrace M, 1992, "Radicalisme" dalam Edwin RA Selingman, *Encyclopedia of The Sosial Sciences*, Vol.XIII-XIV, New York, Macmillan Company
- Martin, E Marty, 1993 "Introduction" dalam *Fundamentalisme Observed*, Chicago
- Mudjihahirin Thohir, 2005, *Kekerasan Sosial di Pesisir Utara Jawa*, Semarang.
- Nur Ahmad (ed.), *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman*, (Jakarta: Kompas, 2001).
- Ritzer, George dan Douglas J Goddman, 1990 *Modern Sociological Theory*, Singapore: The Mc.GrawHill Companies
- Robert N. Bellah, *Beyond Belief, Esai-Esai tentang agama di dunia Modern, menemukan kembali Agama*, terj. Rudy Harisah Alam, (Jakarta: Paramadina, 2000), 273.
- Saiful Mujani, 2007, *Muslim Demokrat, Jakarta* ,PPIM
- Saiful Mujani, Jajat Burhanuddin, dkk., *Benturan Peradaban; Sikap dan Perilaku islamis Indonesia terhadap Amerika*, (Jakarta: Penerbit nalar, 2005)
- Siti Murni, 2010, "**Razia Syariat Islam Di Aceh Belum Ramah Pada Perempuan**", [www.ccde.or.id](http://www.ccde.or.id), 2010
- Syafii Maarif, A, 2000, "**Pertimbangkan Dampak yang akan Timbul**", *Republika*, 23 Agustus

Tamrin Ananda,2010,"*Syariat Islam di Aceh memakan korban Perempuan*" <http://politik.kompasiana.com>. Akses 9 Oktober

Taufiq Abdullah, *Islam dan Masyarakat; Pantulan sejarah Indonesia*, (Jakarta: LP3S, 1987).

Thahir, Lukman.S.,2004, *Studi Islam Interdisipliner*, Yogyakarta, Qirtas

Turner, Jonathan H , 1975, *The Structure of Sociological Theory*, America, Dorsey Press

<http://aceh.tribunnews.com/2015/06/26/menyoal-benturan-antarmazahab-di-aceh>

<http://aceh.tribunnews.com/2015/10/27/persoalan-masjid-raya-dimuzakarahkan>.

## LAMPIRAN FOTO FOTO PENELITIAN

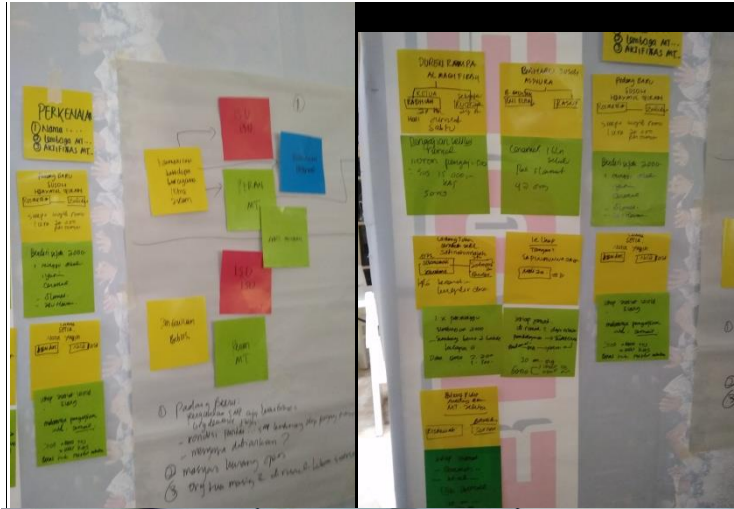


Foto ketika melakukan FGD Dengan Pengurus MT Abdy di Balng Pidie





1. Foto dengan Kepala Dinas Syariat Islam Abdyas selesai wawancara
2. Foto dengan Anggota MAA Abdyas selesai wawancara





**Jadwal Kegiatan Penelitian**  
**Harmonisasi Kehidupan Beragama Intra Islam di Aceh Studi Penguatan Peran**  
**Majelis Ta'lim Kelompok Perempuan**

No	Kegiatan	Bulan / Minggu ke																							
		Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Seminar Proposal dan Persiapan penelitian																								
2	Review Reference																								
3	Pengidentifikasian narasumber penelitian dan desa																								
4	Studi Dokumentasi																								
5	Wawancara dan FGD																								
6	Observasi																								





**BIODATA PENELITI**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN**  
**2018**

**A. Identitas Diri**

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	<b>Dr. Rasyidah, M.Ag</b>
2.	Jenis Kelamin L/P	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Pembina
4.	NIP	197309081998032002
5.	NIDN	2008097301
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	200809730104396
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Medan 8 September 1973
8.	E-mail	<a href="mailto:rasyidah_safi@yahoo.co.id">rasyidah_safi@yahoo.co.id</a>
9.	Nomor Telepon/HP	085260123074
10.	Alamat Kantor	Fakultas Dakwah dan Komunikasi
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Dakwah
13.	Program Studi	Pengembangan Masyarakat Islam
14.	Fakultas	Dakwah dan Komunikasi

**B. Riwayat Pendidikan**

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	Fak. Dakwah IAIN Ar-Raniry	IAIN Ar-Raniry	UIN Walisongo
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh	Banda Aceh	Semarang
3.	Bidang Ilmu/Program Studi	Dakwah Komunikasi Penyiaran	Konsentrasi Ilmu Dakwah	Islamic Studi
4.	Tahun Lulus	1997	2001	2017

### C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2017	Kekerasan Terhadap Perempuan dengan Disabilitas di Kecamatan Mutiara Timur	DIPA UIN
2.	2017	Dakwah Struktural Pakaian Muslimah: Studi Alternatif Strategi Dakwah: Kasus Aceh Barat dan Kelantan Malaysia	SEASREF Foundation Pilipina
3.	2016	Pola Dakwah Pada Masyarakat Pedesaan di Aceh Barat	DIPA UIN
4.	2017	Perempuan dan Sumber Daya Alam	WWF Aceh

### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2017	Wakil Ketua Tim Ahli Program Industri Rumahan Bagi Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
2.	2016-2017	Universitas Membangun Desa: KPM Inovatif UIN Ar-Raniry	Kompak Australia
3.	2016	Pendampingan Penguatan Majelis Taklim Desa Kajhu	Pusat Studi Wanita (PSW) UINAR
4.	2015	Penguatan Dan Pengembangan Pola Asuh Anak Islami Berbasis Majelis Taklim Sebagai Sekolah Cerdas Kaum Ibu Di Aceh Barat Daya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
5.	s/d 2018	Wakil Ketua PKK Desa Kajhu	Desa Kajhu
6.	s/d 2018	Pembina TPA Al Ishlah Kajhu	Swadaya Masy
7.	s/d 2018	Pembina Majelis Taklim Kaum Ibu	Swadaya

		Rekompak Lambateung Kajhu	Masyarakat
--	--	---------------------------	------------

#### E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Dakwah Struktural Pakaian Muslimah di Kelantan Malaysia	Takammul	2017
2.	Pola Dakwah Pada Masyarakat Pedesaan di Aceh Barat	Ijtimaiyyah	2017
3.	"Policy of Equality or Equality in Policy" (An Analysis of Policy on Women in Political Domain in Aceh)	Takammul	2013
	Potensi Konflik dan Masa Depan Islam di Indonesia (Kajian terhadap Tantangan Dakwah)	Al-Bayan	2014

#### F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	Profil Gender Perguruan Tinggi di Aceh	2015	172	Pusat Studi Wanita IAIN Ar-Raniry dan Kementrian Pendidikan
2.	Kiprah Perempuan dalam Mewujudkan dan Memelihara Perdamaian di Aceh (Tim)	2015	374	Pusat Studi Wanita IAIN Ar-Raniry dan Un Women
3.	Masculinities in Post Conflict Aceh and Its	2016	370	Pusat Studi Wanita IAIN

	Impacts on Violence Against Women (Tim)			Ar-Raniry dan Un Women
4.	Kontributor pada buku bunga rampai : Dakwah Islam dan Hubungan Antar Peradaban	2016	200	LP2M UIN
5.	Profil Gender Provinsi Aceh 2017	2017	197	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	KPM Inovatif: Peningkatan Daya Saing Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	2017	Karya Tulis	000100075

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 30 September 2017  
Ketua/Anggota Peneliti,



**Dr. Rasyidah, M.Ag**  
NIDN. 2008097301